

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

INTERNSHIP

*Diajukan kepada Pengelola Program Magister Manajemen
Universitas Diponegoro
Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S - 2 Magister Manajemen*



Diajukan oleh :

N a m a : Drs. Hendro Prihandoko Soenarjo
N I M : C4A097067

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**A GOOD HEART RESULTS FROM
TRUE KNOWLEDGE**



SERTIFIKAT

Saya, Hendro Prihandoko, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa internship yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapat gelar pada Program Magister Manajemen ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.



Hendro Prihandoko

PENGESAHAN INTERNSHIP

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa internship berjudul

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPEDA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Yang disusun oleh Drs. Hendro Prihandoko, NIM.C4A097067
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 April 2001
dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing



DR. Imam Ghozali, M.Com, Akt.

Penguji



Prof. DR. Sujudi Mangunwihardjo

Semarang, 16 April 2001

Universitas Diponegoro

Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Manajemen

Ketua Program



Prof. Dr. Sujudi Mangunwihardjo

ABSTRACT

The background of arranging internship entitled "Strategy of the Increasing Research dan Development at Bappeda of Central Java Province", is an effort to respon strategic environmental change in perspectif of research and development and also the demand of development paradigm change that has emphazise on research activity and develop local development planning procces. In this case, research and development has become a major need that can give alternative in solution of local development. The role of research and development is demanning quality that can be used in the procces of preparing the planning of local development programs.

In the context of increasing the quality of research and development that is done by Bappeda, there are a very complex handicap must be faced. Some problem that must be overcome quickly is a relatively lower quality of the personal on research and development, the policy of research and development do not refer to five agenda of development at Central Java Provice, lack of authority and competence in implementing the function of research and development and also limitation in facility of research and development net sistem that is still by sector.

Problems of research and development that is faced by Bappeda need a structuraly and functionaly handling steps through the strategy planning on increasing quality of the research and development. Aims and advantages of this strategy, are emphasized on increasing and developing internal factor of research and development by using external factors that

can encourage the improvement on research and development quality. It is hoped that the planning of strategy will be one of foundation of policy in increasing research and development quality at Bappeda in the future.

In order to analyse strategi planning on increasing reasearch and development quality, it is used SWOT qualitative analisis method. By using Matrix Internal-External mode. From the analisis, can be known the position of research and development of Bappeda at this time is on growth strategy level with the horizontal integration growth strategy alternative. The suitable strategy to implied in this position is by strengthen and developed research and development institution, development of human resources on research and development, reorientation of the research and development policy, and development of research and development net facility.

The above strategy must be done completetly united, continuted, and integrated with resources that they are possesed, so a strong sinergy to increase quality of the result of the research and development which support optimalisation of local development plan can be achieved.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan ridho'Nya telah memberikan petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan internship ini dengan judul "Strategi Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah"

Internship ini disusun dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah dalam menjalankan salah satu fungsi manajemen pembangunan yang diembannya, yaitu fungsi dibidang penelitian dan pengembangan.

Sebagai suatu kajian ilmiah, internship ini dirancang dengan kajian teori dan studi empiris yang mendasarkan pada analisis SWOT terhadap faktor-faktor internal serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan di Bappeda saat ini. Diharapkan, semoga internship ini dapat dimanfaatkan dan menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada DR. Imam Ghozali, M.Com, Akt, Prof.Dr. Sujudi yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilham dalam penyusunan internship ini. Selanjutnya segala kesalahan serta kekurangan dalam penyusunan insternship ini merupakan tanggungjawab penulis. Namun apabila terdapat kebenaran dalam internship ini semata hanya karena ridho dan petunjuk'Nya.

Semarang, 16 April 2001



Hendro Prihandoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN SERTIVIKASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. LANDASAN TEORI.....	19
A. Strategi Peningkatan Kualitas.....	20
B. Konteks Strategi Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan.....	22
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan.....	30

III. GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN	
PEMBANGUNAN DAERAH.....	36
A. Kedudukan dan Peran Unit Perencana	
Pembangunan Daerah.....	36
B. Visi dan Misi Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	48
C. Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	
Propinsi Jawa Tengah.....	50
IV. ANALISA DATA.....	66
A. Peluang dan Tantangan Strategi Peningkatan	
Kualitas Penelitian dan Pengembangan.....	69
B. Kekuatan dan Kelemahan Strategi Peningkatan	
Kualitas Penelitian dan Pengembangan.....	73
C. Strategi Peningkatan Kualitas Penelitian dan	
Pengembangan Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	94
V. PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel.

4.1. Indikator Penentu Kualitas Litbang Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	67
4.2. Indikator Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	68
4.3. Renstra Penelitian dan Pengembangan Mengacu Pada Isu-Isu Strategis.....	74
4.4. Bidang Utama dan Program-Program Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000.....	75
4.5. Data Pegawai Bidang Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tahun 1997-2000.....	76
4.6. Penempatan SDM Bidang Litbang Sesuai Dengan Pendidikan Formal dan Kualifikasi Jabatan.....	77
4.7. Data Pegawai Bappeda Propinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tahun 1997-2000.....	78

4.8. Bidang Litbang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Bidang Bidang Lainnya Di Lingkungan Bappeda.....	79
4.9. Bidang Litbang Dapat Melakukan Koordinasi Penelitian Dengan Lembaga-Lembaga Penelitian Dinas/Instansi Perguruan Tinggi.....	80
4.10. Bidang Litbang Dapat Mempersiapkan Bahan Masukan Bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	81
4.11. Data Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000.....	82
4.12. Anggaran Litbang Dapat Mendukung Pelaksanaan Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	83
4.13. Perbandingan APBD Propinsi Jawa Tengah Dengan Anggaran Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000.....	84
4.14. Kualitas litbang Perlu Didukung Oleh Sistim Jaringan Penelitian.....	85
4.15. Kelemahan Pelaksanaan Litbang Dapat Dieliminir Melalui Kerjasama Dalam Sistim Jaringan.....	86

4.16. Data Program Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000.....	87
4.17. Renstra litbang Mengacu Pada Propeda Jawa Tengah Tahun 2001-2005.....	88
4.18. Pejabat Struktural Bidang Litbang Dapat Menjalankan Tupoksinya.....	89
4.19. Data Jumlah Jabatan Fungsional Peneliti Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000.....	90
4.20. Data Jumlah Bidang Studi Penelitian Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000.....	90
4.21. SOT Bidang Litbang Saat Ini Dapat Mendukung Pengembangan Kegiatan Litbang.....	92
4.22. Matrik Faktor Strategi Eksternal Yang Mempengaruhi Kualitas Litbang Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	96
4.23. Matrik Faktor Strategi Internal Yang Mempengaruhi Kualitas Litbang Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1. Kedudukan dan Peran Unit Perencana Pembangunan	
Daerah Dalam Tatahan Pemerintah Daerah.....	41
3.2. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan	
Daerah Propinsi Jawa Tengah.....	44
3.3. Struktur Organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan.....	47
4.1. Matrik Internal-Eksternal Strategi Peningkatan Kualitas	
Litbang Pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam empat tahun terakhir sejak tahun 1997 terjadi pergeseran yang cepat dalam bidang pemerintahan, kenegaraan dan kebangsaan. Pergeseran tersebut menyebabkan perubahan nyata terhadap tatanan kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat di daerah, pola hubungan antara pusat dan daerah, serta tatacara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu perubahan yang cukup penting, adalah kesadaran terhadap berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi dan keinginan untuk melakukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bagi terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Keadaan yang dihadapi dalam empat tahun terakhir, antara lain adalah kelambanan dalam melakukan perubahan terhadap pendekatan dan strategi pembangunan yang berlaku selama ini, kelemahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan dan ketidaktepatan dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan.

Jika dicermati pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam bidang pemerintahan, kenegaraan dan kebangsaan yang berimplikasi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan strategis, baik pengaruh dari lingkungan strategis eksternal maupun lingkungan strategis internal. Sebagai akibat kurang cepatnya merespon dan mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis tersebut menyebabkan krisis multi dimensi yang dimulai dengan menyeruaknya krisis ekonomi dan politik, melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas otonomi, rendahnya pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi daerah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat serta daerah.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai bagian integral dari sistim pembangunan nasional, dihadapkan pula pada pengaruh perubahan-perubahan lingkungan strategis. Pengaruh tersebut dapat bersifat kompetitif dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apabila dicermati satu persatu pengaruh ini semakin kompleks dan sulit untuk dipecahkan, belum dilihat dari aspek dampak dan implikasi sinergisnya bagi daerah. Namun untuk memberikan jawaban kongkrit pada dukungan pembangunan daerah dicoba menyederhanakan pengaruh-pengaruh tersebut kedalam

pembaharuan-pembaharuan lingkungan strategis, yaitu globalisasi dan perdagangan bebas, reformasi pembangunan, pemulihan krisis ekonomi, otonomi daerah, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada sisi lain, kondisi pembangunan daerah selama ini masih cenderung menekankan pada pendekatan internal regional dan relatif bersifat top down kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Disamping itu juga kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah sehingga menyebabkan lemahnya kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam merespon dinamika perubahan lingkungan strategis dan tuntutan perubahan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah saat ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola perubahan-perubahan tersebut dengan lebih tepat sesuai kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk itu kebijakan yang ditempuh adalah melakukan perubahan paradigma manajemen pembangunan daerah yang lebih dinamis, aspiratif dengan mengedepankan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini penelitian dan pengembangan sudah menjadi suatu kebutuhan yang timbul dari pertimbangan meningkatnya intensitas dan skala

pembangunan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula intensitas dan ekstensitas kompetisi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah pembangunan daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut harus didukung penelitian serta pengkajian karakterisasi dan pemanfaatan pengaruh lingkungan strategis terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah. Perubahan-perubahan strategis sebagaimana diungkapkan diatas menghendaki penyesuaian, reorientasi dan strategi pembangunan baru di segala bidang. Penelitian dan pengembangan ditantang untuk berperan sebagai mata tombak pembangunan, yang berarti efektif memberikan masukan bagi pelaksanaan program-program dan pemecahan masalah pembangunan daerah. Dengan demikian semakin disadari, bahwa peranan penelitian dan pengembangan dimasa depan akan berlangsung pada skala dan kompleksitas yang jauh lebih tinggi daripada yang selama ini telah dilaksanakan.

Dalam **TAP MPR RI No. IV/MPR/1999**, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 disebutkan, bahwa pengembangan dan penerapan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya termasuk fisik prasarana pembangunan, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global. Kondisi demikian ini mencerminkan kegiatan penelitian dan pengembangan

belum sebagaimana yang diharapkan untuk dapat mendukung pemecahan masalah pembangunan daerah, baik di Pusat maupun Daerah.

Kenyataan ini pula yang masih dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam menempatkan posisi penelitian dalam sistim pembangunan daerah. Kendala yang dihadapi adalah sumber daya penelitian belum termanfaatkan secara optimal untuk merumuskan strategi kebijaksanaan dan prioritas utama program secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Dalam menentukan prioritas kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan selama ini cenderung masih bersifat parsial serta belum sepenuhnya terfocus pada pemecahan masalah pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Pola Dasar Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan Propinsi Jawa Tengah yang pada era pemerintahan saat ini telah diubah menjadi Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Repetada). Kondisi ini mendorong adanya reorientasi kebijakan penelitian dan pengembangan maupun prioritas program penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, lembaga teknis daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai inisiator kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan yang berwenang melakukan reorientasi kebijakan serta mereposisi penentuan prioritas program penelitian dan pengembangan, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah atau lazim disebut dengan Bappeda.

Kedudukan Bappeda sebagaimana yang diatur dalam ***Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980***, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ***Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 tahun 1981*** tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, adalah sebagai badan staf di bidang perencanaan pembangunan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi Bappeda disebutkan antara lain, adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dan pengembangan wilayah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok tersebut secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sebagai institusi pemikir strategik, Bappeda dituntut menjadi inisiator atau pemrakarsa dari berbagai gagasan perubahan dan pembaharuan yang disebabkan oleh tuntutan lingkungan strategis. Tantangan besar yang muncul adalah membuat perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif dan berorientasi pada hasil penelitian yang berlandaskan moral dan etika serta mengacu pada kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang dianggap lemah pada masa-masa sebelumnya. Untuk mengakomodasikan kegiatan penelitian yang berorientasi pada kebutuhan perencanaan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan daerah, diperlukan rencana tindak yang implementatif dan aplikatif melalui penyusunan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Dengan strategi ini diharapkan mampu berperan menyediakan landasan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan umpan kedepan bagi pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian rencana strategi penelitian dan pengembangan tersebut dapat pula meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang dikoordinir maupun dilaksanakan oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian dan

pengembangan yang berorientasi pada perubahan-perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan perencanaan pembangunan daerah belum terprogram secara konseptual maupun secara sistematis. Kondisi ini antara lain dikarenakan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana penelitian yang dimiliki serta manajemen penelitian yang belum mengantisipasi kebutuhan dan keperluan.

Selain itu penelitian yang dilaksanakan selama ini masih cenderung berorientasi penelitian hanya untuk penelitian dan kurang mempertimbangkan expert judgement (pandangan pakar) serta customer feed back (umpan balik pelanggan). Hal-hal tersebut mempengaruhi dan menyebabkan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda dinilai masih kurang memenuhi standart kualitas penelitian yang layak, karena belum berorientasi pada pemecahan masalah - masalah pembangunan daerah dan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan yang harus dipecahkan, adalah bagaimana meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan melalui penyusunan rencana strategi penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya penelitian yang tersedia agar dapat diperoleh hasil-hasil penelitian dengan kajian yang berkualitas, baik dari aspek akademisi maupun aspek pemecahan masalah pembangunan daerah.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Fleksibilitas Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai sub sistim dalam unit Bappeda Propinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tuntutan serta pengaruh perubahan lingkungan strategis menjadi suatu kebutuhan yang makin signifikan untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam keadaan seperti ini fleksibilitas melalui proses saling menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi memerlukan kebijaksanaan penelitian yang berorientasi pada expert power dan stake holders. Dengan kata lain Bappeda sebagai salah satu penggerak utama dalam pembangunan daerah diharapkan lebih responsif dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dengan mendorong adanya reorientasi kebijaksanaan serta prioritas program penelitian dan pengembangan.

Berpijak pada uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bidang Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah yang berorientasi pada kebutuhan perencanaan dan pemecahan masalah pembangunan daerah dengan mempertimbangan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya.

Sedangkan untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

- Bahan informasi dalam menentukan kebijakan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di Bappeda Propinsi Jawa Tengah dimasa yang akan datang.
- Landasan atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian sejenis pada unit kerja pemerintah daerah lainnya.

D. METODOLOGI

1. Pendekatan.

Pengkajian strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan fokus pada aspek sumber daya dan manajemen penelitian yang sesuai dengan tuntutan serta pengaruh perubahan-perubahan lingkungan strategis dan pemecahan masalah pembangunan daerah. Dengan demikian secara umum strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan dimaksud menekankan pada aspek sumber daya manusia penelitian sebagai titik simpul penentu seluruh kegiatan yang diprogramkan dan seluruh unsur pranata penelitian untuk dapat berkiprah secara optimal juga diutamakan, khususnya dalam menjalin jaringan kelembagaan guna

menyuburkan terjadinya inovasi dan mengefektifkan pendifusian penelitian dan pengembangan. Selanjutnya aspek-aspek lain yang perlu dicermati lebih mendalam, adalah kebijaksanaan manajemen penelitian dan pemberdayaan penelitian dalam segala gerak kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan dan atau dalam lingkup manajemen pemerintahan daerah Propinsi Jawa Tengah.

Berangkat dari beberapa aspek tersebut dilakukan tinjauan kritis terhadap kondisi yang sudah ada serta tuntutan, aspirasi maupun kebutuhan yang spesifik daerah secara lebih mendalam. Melalui proses analisa secara mendalam ini diharapkan mampu menciptakan keluaran konsep sederhana, jelas dan tegas sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan program-program penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu proses analisis akan dilakukan secara cermat dan tepat dengan jalan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder secara akurat serta valid, pengolahan data secara cermat dan melakukan analisis yang tajam serta mendalam. Hasil analisa dan kesimpulan menjadi dasar dalam penyusunan saran atau rekomendasi bagi strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan lembaga-lembaga riset lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

3. Populasi dan Sampel Penelitian.

Suatu penelitian dapat bersifat penelitian populasi maupun penelitian sampel. Penelitian yang bersifat penelitian populasi berarti seluruh subyek di dalam wilayah penelitian dijadikan subyek penelitian. Sedangkan penelitian yang bersifat penelitian sampel hanya sebagian dari subyek penelitian yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan (*Sumanto, 1995, h. 39*). Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian sampel, karena dengan mengambil sebagian dari populasi sebagai subyek penelitian sudah dapat mencerminkan sifat populasinya.

a. Populasi.

Populasi penelitian ini, adalah seluruh pegawai di lingkungan unit kantor Bappeda Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 6 (enam) sub unit, yaitu 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat dengan jumlah cakupan populasi sebesar 228 pegawai. Masalah yang

dikaji melalui penelitian ini yang sumber informasinya dari populasi ini adalah aspek-aspek dan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh Bappeda Prop. Jateng.

b. Sampel.

Penelitian ini menggunakan teknik stratified sampling, karena populasi penelitian terdiri dari beberapa bidang yang tidak homogen tugas pokok dan fungsinya, yang selanjutnya dari masing-masing sub unit organisasi akan dipilih sampel secara strata, sehingga semua sub unit organisasi pada populasi diwakili oleh sampel tersebut dengan perbandingan sesuai jumlah yang ada pada populasi. Cakupan sampel sebesar 30 orang dari populasi dan untuk masing-masing sub unit diwakili oleh 5 orang yang terdiri dari 2 orang unsur pimpinan serta 3 orang unsur staf perencana. Stratifikasi sample meliputi 5 Kepala Bidang, 1 Sekretaris, 6 Kepala Seksi dan 18 Staf Perencana pada masing-masing bidang perencana Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan penentuan masing-masing responden tersebut dilakukan melalui tehnik judgment sampling.

4. Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Dokumentasi.

Metode dokumentasi digunakan untuk merekam data dan informasi yang terdapat di kantor Bappeda Propinsi Jawa Tengah. Data yang direkam tersebut meliputi jumlah sumber daya penelitian yang terbagi lagi dalam data jumlah SDM, jumlah kegiatan penelitian, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah dan litbang, dan kebijakan-kebijakan penelitian dan pengembangan yang terdapat dalam Perpustakaan, Sekretariat dan Bidang Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

b. Kuestioner.

Metode kuestioner digunakan untuk memperoleh data di instansi yang menjadi sampel penelitian. Kuestioner dirumuskan secara terbuka agar responden memiliki keleluasaan di dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

c. Wawancara Terpimpin.

Metode wawancara terpimpin (guided interview) digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari instansi sumber informasi.

Wawancara ini dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan terbuka sebagai pedoman. Pedoman wawancara tidak dirumuskan secara rinci, namun dibuat secara garis besar sehingga peneliti diberikan keleluasaan untuk mengembangkan sendiri ketika melakukan wawancara dengan responden.

5. Sumber Data.

a. Data Primer.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada responden dan hasil pengisian kuestioner yang dibagikan kepada responden. Data-data yang dikumpulkan dari responden, adalah :

- 1) Kondisi saat ini.
- 2) Potensi yang dimiliki.
- 3) Permasalahan yang dihadapi.
- 4) Alternatif pemecahan masalah.
- 5) Program penelitian yang diharapkan.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan intern kantor Bappeda Propinsi Jawa Tengah serta instansi terkait yang meliputi data-data :

- 1) SDM Bappeda dan Bidang Penelitian.
- 2) Sarana prasarana pendukung penelitian dan pengembangan.
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan.
- 4) Produk-produk perencanaan pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah.
- 5) Produk-produk perencanaan penelitian dan pengembangan Propinsi Jawa Tengah.
- 6) Hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan Propinsi Jawa Tengah.

6. Tehnik Analisa Data.

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT yang dilakukan dengan display data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dari hasil analisis SWOT tersebut akan diperoleh gambaran strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan laporan internship Strategi Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi dan sistimatika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari pembahasan strategi peningkatan kualitas, konteks strategi peningkatan litbang dengan masalah pembangunan daerah serta faktor-faktor peningkatan kualitas litbang yang mempengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian litbang pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

BAB III. GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH

Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan peran unit perencanaan pembangunan daerah, visi dan misi Bappeda Propinsi Jawa Tengah serta kebijaksanaan Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB IV. ANALISA DATA

Dalam bab ini dipaparkan kajian peluang dan tantangan strategi peningkatan kualitas litbang, kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan kualitas litbang serta kajian mengenai strategi peningkatan kualitas litbang pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode analisis SWOT.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penarikan kesimpulan dan saran yang mendasarkan pada hasil analisa data akan diuraikan dalam bab ini, antara lain meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu orientasinya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan-lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan tersebut. Perubahan-perubahan lingkungan strategis sebagaimana diungkapkan pada bab terdahulu menghendaki adanya penyesuaian, reorientasi dan strategi pembangunan di segala bidang, diantaranya adalah pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengembangan ditantang untuk berperan sebagai mata tombak pembangunan, yang berarti efektif memberikan masukan bagi pelaksanaan program-program dan pemecahan masalah pembangunan daerah. Kunci strategis untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategis itu, adalah meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan melalui penelitian yang berorientasi pada kebutuhan pengguna penelitian serta meningkatkan kemampuan manajemen dan sumber daya penelitian termasuk menentukan arah kebijaksanaan penelitian yang difokuskan pada isu strategis dan prioritas program.

A. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS.

Yang diartikan strategi dalam peningkatan kualitas, adalah suatu rencana tindakan strategis atau cara-cara tertentu dengan menggunakan tehnik dan metode tertentu pula untuk meningkatkan kualitas. Menurut **George L. Morrissey (1997, h. 6)**, rencana tindakan strategis mencakup langkah dan tahapan utama yang diperlukan untuk bergerak menuju posisi masa depan yang telah diproyeksikan. Dalam hal ini telah diidentifikasi langkah-langkah dan tahapan prioritas yang diperlukan untuk bergerak menuju sasaran jangka panjang. Strategi dianggap sebagai jembatan utama antara rencana jangka pendek dengan jangka panjang yang diarahkan pada pemenuhan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Definisi kualitas menurut Sieger dirumuskan sebagai terus-menerus mengejar kesempurnaan oleh perusahaan secara keseluruhan dan difokuskan pada bagaimana melakukan semua kegiatan dengan benar sejak pertama kali (**Lesley Munro, Malcolm Munro-Faure, 1999, h. 4**). Sementara itu W. Edward Deming dalam buku "Total Quality Control" **James W. Cortada (1999, h. 9)** mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kualitas, adalah perbaikan berkesinambungan.

Definisi Deming merupakan konsep yang mengandung pengertian bahwa segala sesuatu mengalami perubahan secara terus menerus, oleh karena itu harus dikembangkan proses-proses yang mengarah pada perbaikan segala sesuatu. Konsep Deming tersebut mencakup pemahaman kualitas yang mengutamakan pada pemahaman akan pentingnya pendalaman penguasaan pengetahuan, sistim, teori variasi dan kekuasaan atau wewenang. Pengetahuan yang luas dan mendalam adalah penting. Pengetahuan berguna untuk memprediksi hasil yang didasarkan atas data-data pengukur. Sistim merupakan kumpulan fungsi atau aktifitas yang dipahami secara jelas dalam sebuah organisasi. Orang-orang yang bekerja dalam sebuah sistim, bekerja sebagai sebuah tim dengan tujuan yang sama berdasarkan kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Teori variasi adalah penerapan analisis untuk memahami apa yang terjadi dan mengapa terjadi, sehingga tindakan-tindakan korektif dapat segera dilakukan jika memang tepat untuk meningkatkan kinerja. Untuk memutuskan dan menentukan tindakan-tindakan korektif dilakukan pengambilan keputusan melalui perintah atau kekuasaan. Kelebihan konsepsi Deming terhadap kualitas secara jelas merinci atribut-atribut aktifitas yang melekat pada kualitas.

Dengan demikian pemahaman mengenai strategi peningkatan kualitas diartikan sebagai seperangkat praktek yang bersifat strategis, jangka panjang, memuat aspek pengetahuan, sistim, teori variasi dan wewenang yang memungkinkan manajemen untuk menyampaikan usulan-usulan perbaikan berkesinambungan diseluruh fungsi organaisasi. Strategi ini mengarah pada praktek-praktek kualitas atau peningkatan mutu dalam seluruh aktifitas sistim organisasi (*James W. Cortada, 1996, h. 31*).

B. KONTEKS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Strategi peningkatan kualitas yang telah dinyatakan terdahulu lebih difokuskan pada penajaman dan mentaktiskan suatu usaha yang sudah ada secara berkesinambungan dengan menggunakan tehnik-tehnik pengetahuan yang sistimatis. Dikaitkan dengan penelitian dan pengembangan sebagai penggunaan metode ilmiah secara formal dan sistimatis untuk menjawab atau menyelesaikan masalah, menegaskan kembali bahwa strategi peningkatan kualitas untuk memenuhi kualitas penelitian dan pengembangan yang diharapkan, tidak terlepas dari prosedur dan kaidah ilmiah yang harus dipenuhi serta tujuan penelitian yang dicapai.

Dalam konteks kualitas penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya dipengaruhi oleh permasalahan eksternal dan internal, karena diantara keduanya memang sangat berkaitan dan saling menunjang. Permasalahan eksternal yang mempengaruhi kualitas penelitian dan pengembangan banyak dipengaruhi oleh isu globalisasi yang menuntut kemajuan disegala bidang. Sebagai suatu kenyataan yang dihadapi saat ini, isu globalisasi telah mampu merubah paradigma pembangunan di suatu negara. Dalam era globalisasi seperti ini jelas dituntut adanya efisiensi dan transparansi yang lebih mengarah pada peningkatan kualitas baik sektor swasta maupun pemerintah. Adanya globalisasi yang melanda hampir setiap negara ditandai oleh apa yang disebut dengan investment, industry, information dan individual. Keempat hal ini dapat menyebabkan hilangnya batas-batas geografis suatu negara. Melalui investment tiap negara bisa melakukan investasi dimanapun yang dia inginkan termasuk bidang-bidang investasinya tanpa adanya kendala geografis. Sedangkan melalui industri tiap negara secara bebas bisa melakukan relokasi industri dimana saja selama hal tersebut bisa melayani pasar serta memiliki potensi sumber daya yang mendukung industrinya. Disisi lain dengan tingginya teknologi, perusahaan bisa mendapatkan informasi atau mengontrol perusahaannya tanpa harus membangun sistim bisnisnya dilokasi perusahaan tersebut berada. Dengan melihat kondisi tersebut

para konsumen secara individual hanya menginginkan produk dengan kualitas tinggi dengan harga terjangkau tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkan produk tersebut.

Pada akhirnya globalisasi melanda bukan saja dalam konteks negara namun daerah termasuk wilayah Jawa Tengah. Investor asing di era mendatang dapat melakukan aktifitas diseluruh wilayah Jawa Tengah. Dalam hal ini globalisasi sebagai faktor eksternal bisa dipandang oleh Jawa Tengah sebagai ancaman sekaligus peluang, tergantung dari kondisi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dari Jawa Tengah. Adanya kondisi yang demikian jelas membutuhkan reorientasi dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang pembangunan; termasuk yang mendasar yaitu pembangunan bidang penelitian dan pengembangan. Fenomena globalisasi menuntut adanya karakteristik pemerintah daerah yang berjiwa wira usaha, antara lain dengan mengutamakan penelitian dan pengembangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Konsep ini dikenal dengan istilah mewirusahaakan birokrasi atau *reinventing goverment (Osborne dan Gaebler, 1996, h. 223)*. Dalam hal ini pemerintah daerah memandang pihak swasta dan masyarakat sebagai pemegang peran utama atau *stake holders* dan fungsi peemrintah daerah yang utama adalah lebih banyak mengarahkan daripada melaksanakan, lebih berorientasi menghasilkan daripada membelanjakan serta bertindak aspiratif atau pencegahan.

Upaya tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui strategi " 4C " sebagaimana yang dikemukakan oleh **Mudrajat Kuncoro (1997, h. 86)**, yaitu core strategy, consequences strategy, customer strategy, control strategy dan cultur strategy. Dalam hal ini diartikan bahwa dalam meningkatkan pembangunan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna perlu memiliki strategi inti, strategi konsekuensi, strategi penanganan pelanggan, strategi pengawasan dan strategi membudayakan kerja wira usaha. Dengan konsep ini akan diwujudkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang produktif dan progresif dalam kerangka pikir yang analitis serta operasional kerja yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah dalam mengembangkan perencanaan pembangunan perlu memiliki konsep dan strategi kebijakan yang memanfaatkan segala kompetensinya dan mampu menghubungkan dengan upaya operasional peengembangannya pada sektor dan program. Masih dalam kaitannya dengan permasalahan eksternal, strategi-strategi yang dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah jelas membutuhkan suatu perencanaan yang tepat dengan mendasarkan pada hasil-hasil penelitian yang integratif dan komprehensif sebelum dilaksanakan. Untuk itu diperlukan perencanaan penelitian dan pengembangan di seluruh aktifitas pembangunan dengan melakukan identifikasi dan analisis, agar aktifitas pembangunan dapat berkembang secara optimal sesuai potensi daerah yang dimiliki. Apabila hal ini

terakumulasi secara jelas, maka semua penelitian dan pengembangan dapat diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan daerah seiring dengan pengaruh dan tuntutan lingkungan strategis eksternal. Berdasarkan identifikasi dan analisis penelitian ini dapat dirumuskan skenario serta alternatif kebijaksanaan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang mampu merespon perubahan-perubahan lingkungan strategis yang berlangsung terus-menerus.

Permasalahan internal yang mempengaruhi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan sangat dipengaruhi permasalahan eksternal. Organisasi pemerintah dan swasta tidak dapat menghindarkan pengaruh dari isu globalisasi sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis eksternal. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang mendasar itu demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah juga mengalami perubahan yang berlangsung secara cepat seiring dengan gerakan reformasi yang telah mengubah seluruh tatanan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah daerah perlu memberikan respons yang tepat untuk menghadapinya. Di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat dikembangkan kemajuan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan internal dengan tujuan agar lebih mampu menangani kompleksitas pembangunan yang makin tinggi. Beberapa aspek internal yang mendorong optimalisasi kualitas penelitian dan iptek

dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategi menurut **AS. Hikam (1999, h. 8-9)**, adalah sebagai berikut :

1. Pendinamisan momentum pembangunan.

Mengarahkan sumber daya ristik untuk mengatasi dampak krisis serta memanfaatkan peluang yang terbuka untuk merevitalisasi momentum pembangunan.

2. Penerapan tatanan sosial politik.

Mengkaji berbagai perubahan paradigma serta menelaah kelemahan struktural dan kelembagaan yang perlu diatasi secara berkelanjutan untuk mengukuhkan landasan pembangunan nasional dan daerah.

3. Pemberlanjutan pembangunan ekonomi.

Memperkuat dan meningkatkan efektifitas dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan insentif untuk memperkuat struktur sistim produksi nasional dan daerah.

4. Reposisi kelembagaan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meletakkan kelembagaan riset agar dapat memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

5. Peningkatan kemandirian dan keunggulan.

Meningkatkan daya serap kemajuan ristik dan menumbuhkan kemampuan inovasi sebagai landasan pembentukan kemandirian dan keunggulan.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Menyediakan dukungan riset untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan segala sesuatu yang merupakan kecenderungan atau keprihatinan global serta meningkatkan komabilitas pembangunan dengan perkembangan global.

Freddy Rangkuti (2000,h.18) menyatakan, bahwa untuk memformulasikan strategi peningkatan kualitas perlu dilakukan analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan lingkungan strategis eksternal yaitu kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersama dapat meminimalkan lingkungan strategis internal yaitu kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Dengan demikian formulasi perencanaan strategis peningkatan kualitas harus dilakukan melalui analisa faktor-faktor strategis organisasi dalam kondisi yang ada pada saat ini. Untuk mengkaji faktor-faktor strategis tersebut digunakan model matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dan model matrik Faktor Strategi Internal (IFAS).

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi dan mengkaji masing-masing pengaruh melalui EFAS dan IFAS, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi dan hasil analisis EFAS dan IFAS dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Freddy Rangkuti (2000,h.42)

lebih lanjut menyatakan pula, bahwa untuk memperoleh strategi di tingkat compaste ataupun lembaga pemerintah yang lebih detail dengan tanpa memperhitungkan pesaing digunakan parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi melalui model matrik Internal-Eksternal. Model ini dapat mengidentifikasi 9 strategi yang dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu :

a. Growth Strategy.

Kelompok strategi pertumbuhan merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri, yaitu : (1) pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi vertical; (2) pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horizontal; dan (3) pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horizontal dan tak ada perubahan profit strategi serta atau upaya diversifikasi, yaitu pertumbuhan dengan diversifikasi konsentrik dan pertumbuhan dengan diversifikasi konglomerat.

b. Stability Strategy.

Stability strategi adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan.

c. Retrenchment Strategy.

Strategi ini digunakan untuk memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan, yaitu melalui turn around atau divestment maupun dengan cara likuidasi.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Seperti telah dikemukakan didepan, peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah akan menjadi makin penting pada waktu pembangunan itu perlu disiapkan pada tingkatan penyusunan kebijakan strategik atau perencanaan. Dikaji dari prespektif ini, terlihat bahwa penelitian dan pengembangan akan banyak diharapkan berperan sebagai sumber dari berbagai gagasan strategik baik dalam rangka adaptasi eksternal maupun internal. Untuk memenuhi peran tersebut penelitian dan pengembangan harus dapat meningkatkan kualitasnya, baik pada aspek manajemen maupun sumber daya penelitian yang dimiliki.

Disebutkan oleh *Suharsini Arikunto (1998, h. 10)*, bahwa kualitas penelitian sebagai kegiatan ilmiah mengandung tiga persyaratan yang menjadi faktor penentu kualitas kegiatan ilmiah tersebut, yakni dilakukan bertujuan, terencana dan sistimatis. Tiga prasyarat tersebut mengandung pengertian kegiatan penelitian dianggap memiliki kualitas yang disyaratkan apabila disusun dengan kaidah ilmiah atau akademik, problem solving dan didukung oleh sistim manajemen serta sumber daya yang diperlukan melalui pengorganisasian penelitian yang komprehensif.

Gibson, Ivancevich, Dorelly (1997, h. 354-355)

mengemukakan faktor-faktor kualitas dalam pengembangan organisasi secara makro mempunyai karakteristik, yaitu :

1. Terencana dan jangka panjang.

Pendekatan untuk berubah yang berdasarkan data dan melibatkan semua bagian yang masuk dalam perencanaan manajerial. Melibatkan penetapan tujuan, rencana tindakan, pelaksanaan, pemantauan dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan. Karena perubahan signifikan yang diantisipasi dan diinginkan, tidak ada hasil segera yang diharapkan, seluruh proses menyita waktu bertahun-tahun.

2. Berorientasi pada masalah.

Menerapkan teori dan riset dari sejumlah disiplin, termasuk ilmu perilaku, terhadap solusi dari masalah yang dihadapi.

3. Merefleksikan pendekatan sistim.

Selain berhubungan dengan keterampilan, berhubungan pula dengan sistimik. Pendekatan sistim ini merupakan suatu cara yang mengkaitkan SDM dan potensi organisasi dengan lebih berpihak pada teknologi, struktur dan proses manajemen.

4. Berorientasi pada tindakan.

Memfokuskan pada pencapaian hasil. Tidak seperti pendekatan perubahan yang cenderung menjelaskan, tetapi menekankan pada bagaimana segala sesuatu berjalan

5. Melibatkan agen pengubah.

Proses membutuhkan peran sebagai fasilitator dari agen pengubah untuk membantu organisasi mengarahkan kembali fungsi-fungsinya.

6. Melibatkan prinsip pembelajar.

Ciri dasar dari faktor ini adalah keterkaitan pada pendidikan SDM kembali untuk membawa perubahan. Pendidikan kembali melibatkan penerapan prinsip pembelajaran dasar

Karakteristik yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, Dorelly ini menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan pengembangan lebih terfokus pada aspek manajemen dan perilaku organisasi secara menyeluruh, terutama untuk mempelajari segala sesuatu yang bersifat baru.

Dari batasan-batasan kualitas dan pengembangan tersebut perlu dilakukan integrasi internal yang sinergik untuk dapat menentukan faktor-faktor dominan yang berpengaruh meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat dicapai melalui upaya yang bersifat fungsional, prosedural, substansial dan struktural atau kombinasi

keempat-empatnya. Oleh karena itu ditetapkan faktor-faktor yang mempunyai relevansi tinggi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

(1) Rencana strategi penelitian dan pengembangan.

Kebijaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai rencana strategi jangka panjang litbang yang ditetapkan seharusnya tidak terlepas dari perubahan mendasar dalam kebijaksanaan pembangunan daerah tahun 2000-2005 yang memprioritaskan 5 agenda kebijakan, yaitu :

- Mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi.
- Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.
- Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
- Memberdayakan masyarakat dan daerah.

Dalam rangka mendukung perubahan mendasar dalam prioritas kebijaksanaan pembangunan daerah tersebut, menuntut pula perubahan orientasi kebijaksanaan penelitian dan pengembangan jangka panjang.

(2) Sumber daya tenaga penelitian.

Produktifitas dan kualitas penelitian ditentukan pula oleh kualitas sumber daya manusia serta prasarana penelitian. Pengembangan sumber daya penelitian tersebut merupakan satu kesatuan dari rangkaian kegiatan dalam peningkatan kemampuan penelitian. Oleh karena itu langkah strategis selanjutnya, adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penelitian termasuk tenaga fungsional peneliti melalui program-program pendidikan formal, pendidikan pelatihan fungsional dan pembinaan kader serta rekrutmen aparat penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan.

(3) Organisasi dan kelembagaan penelitian.

Penelitian dan pengembangan akan memainkan peran yang lebih baik sebagai landasan dan ujung tombak pembangunan untuk menghasilkan ristik yang memiliki jangkauan lebih luas dan menjadi prioritas daerah yang tinggi untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menghadapi tugas-tugas yang semakin berat, yaitu memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang secara kuantitas dan kualitas meningkat serta menghadapi pengaruh eksternal dan internal maka struktur organisasi dan kelembagaan Bidang Litbang pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah perlu secara

berkala dievaluasi dan disempurnakan sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya.

(4) Sistem jaringan penelitian dan pengembangan.

Selama ini Bappeda beserta seluruh sub unit organisasinya, terutama Bidang Litbang mengalami berbagai keterbatasan untuk menangani bidang-bidang penelitian yang diprioritaskan yang menjangkau prioritas program-program pembangunan daerah. Keterbatasan ini antara lain dibatasi oleh mandat yang telah ditetapkan. Di lain pihak disadari bahwa masalah yang dihadapi lebih berat dan hanya dapat diselesaikan melalui cara pendekatan yang lebih baik serta cara pendekatan yang lebih sinergistic. Atas dasar pertimbangan tersebut sebagai langkah strategi selanjutnya diperlukan pendekatan yang lebih terpadu mencakup berbagai disiplin dan institusi dalam satu sistem jaringan kerja.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

A. KEDUDUKAN DAN PERAN UNIT PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

Kedudukan dan peran unit perencana pembangunan daerah diatur dalam *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981*, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Bappeda adalah Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Mengenai fungsi Bappeda diatur dalam *Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981, Pasal 4*, dijelaskan fungsi-fungsinya sebagai berikut :

1. Menyusun Pola dasar Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah.

2. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada butir 1 dan 2 yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada di daerah.
5. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama Biro Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/ Daerah.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Dari fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terlihat, bahwa perannya bersifat strategik. Karakteristik peran ini membawa berbagai

konsekuensi kebijakan, arah dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur selaku pimpinan daerah.

Pertama, unit perencana pembangunan daerah perlu menjadi pihak yang paling berwenang untuk menginterpretasikan wawasan pucuk pimpinan daerah menjadi rencana pembangunan daerah. Untuk dapat menanggung wewenang ini secara bertanggungjawab, pihak unit perencana pembangunan daerah perlu memiliki akses langsung pada pimpinan daerah. Akses langsung ini sebaiknya bersifat non formal demi untuk memungkinkan berkembangnya dialog yang sehat.

Kedua, unit perencana pembangunan daerah perlu memahami pula dengan baik pihak aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menempatkan kebutuhan pembangunan dalam perspektif yang tepat. Untuk dapat mencapai keadaan seperti ini, unit perencana pembangunan daerah perlu mengembangkan kemampuan pemantauan dinamika lingkungan eksternal yang memadai serta kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan pemantauan dapat dikembangkan melalui pengembangan suatu sistim informasi yang didukung oleh aparatur pengumpulan data dan informasi yang memadai.

Ketiga, unit perencana pembangunan daerah perlu selalu menguji kesahihan wawasan pembangunan yang ada dan mengembangkan suatu strategi pembangunan daerah yang lebih cocok

dengan perkembangan lingkungan. Pengujian kesahihan wawasan pembangunan dan pengembangan strategi pembangunan daerah dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengkajian serta analisis melalui penelitian kebijakan strategik. Kegiatan ini perlu dijadikan bagian integral dari kegiatan unit perencana pembangunan daerah dan tidak ditangani sebagai suatu tugas rutin biasa, tetapi dijalankan sebagai suatu kegiatan khusus yang melibatkan pula pucuk pimpinan unit perencana pembangunan daerah serta menjalin kerjasama dengan para pakar pembangunan.

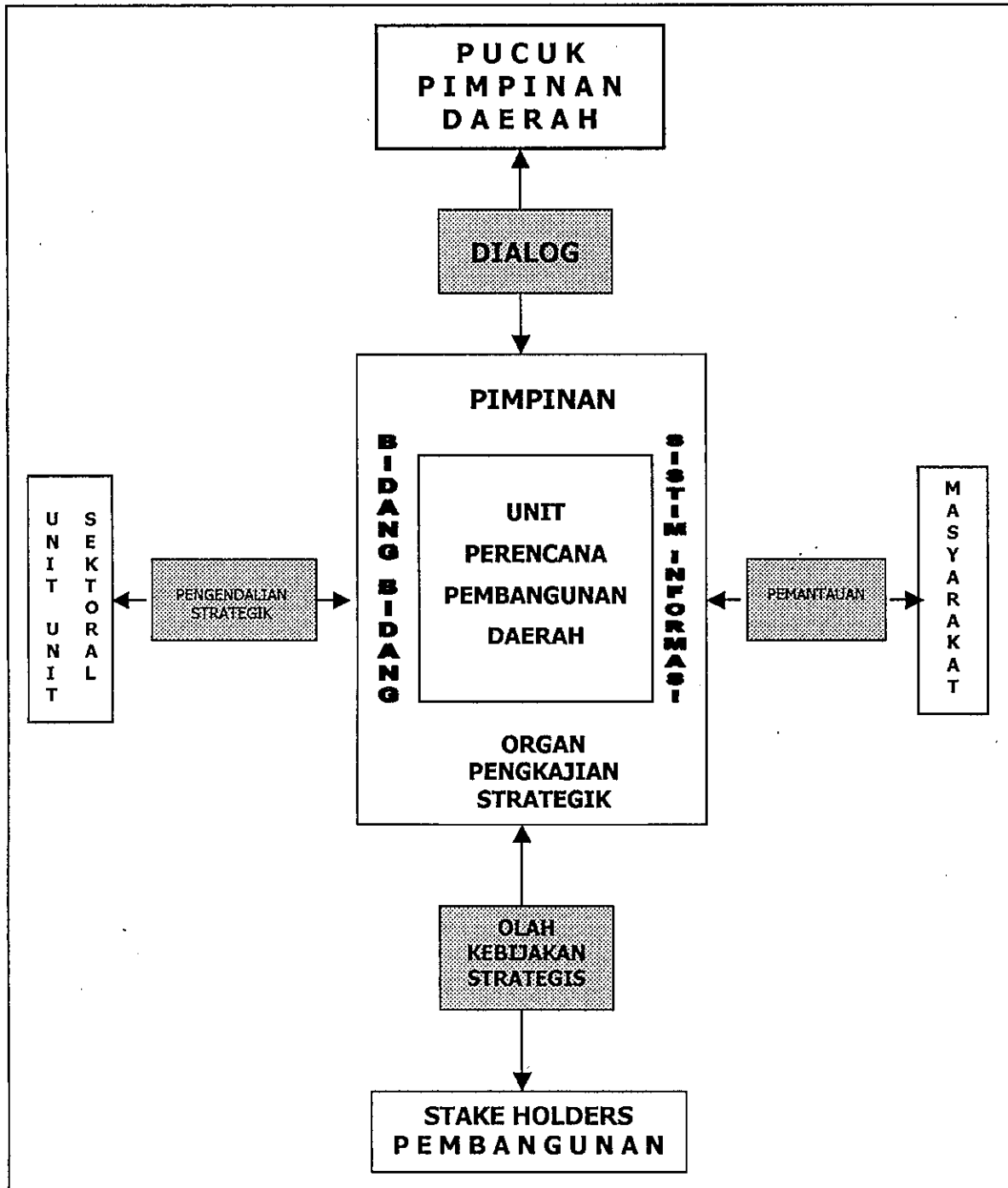
Keempat, dalam rangka menjaga kompatibilitas dari rencana-rencana sektoral dengan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, maka unit perencana pembangunan daerah perlu melakukan pengendalian strategik dengan cara mengendalikan proses perencanaan pembangunan sektoralnya. Pengendalian strategik ini dilakukan oleh bidang-bidang dari unit perencana pembangunan daerah yang menangani bidang-bidang yang relevan dengan sektor-sektor pembangunan yang terkait.

Secara ringkas, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit perencana pembangunan daerah di Propinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan dan peran sebagai :

1. Pemberi interpretasi dari wawasan pucuk pimpinan daerah.
2. Pemantau dinamika lingkungan strategis eksternal.
3. Pembaru wawasan dan kebijakan pembangunan daerah.
4. Pengendali strategik pembangunan daerah.

Keempat peran ini dijalankan secara serentak dan sistematik dengan menggunakan pendekatan sistemik. Kedudukan unit perencana pembangunan daerah bila dikaji dari peran yang perlu dijalankannya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Kedudukan Dan Peran Unit Perencana Pembangunan Daerah
Dalam Tataan Pemerintah Daerah



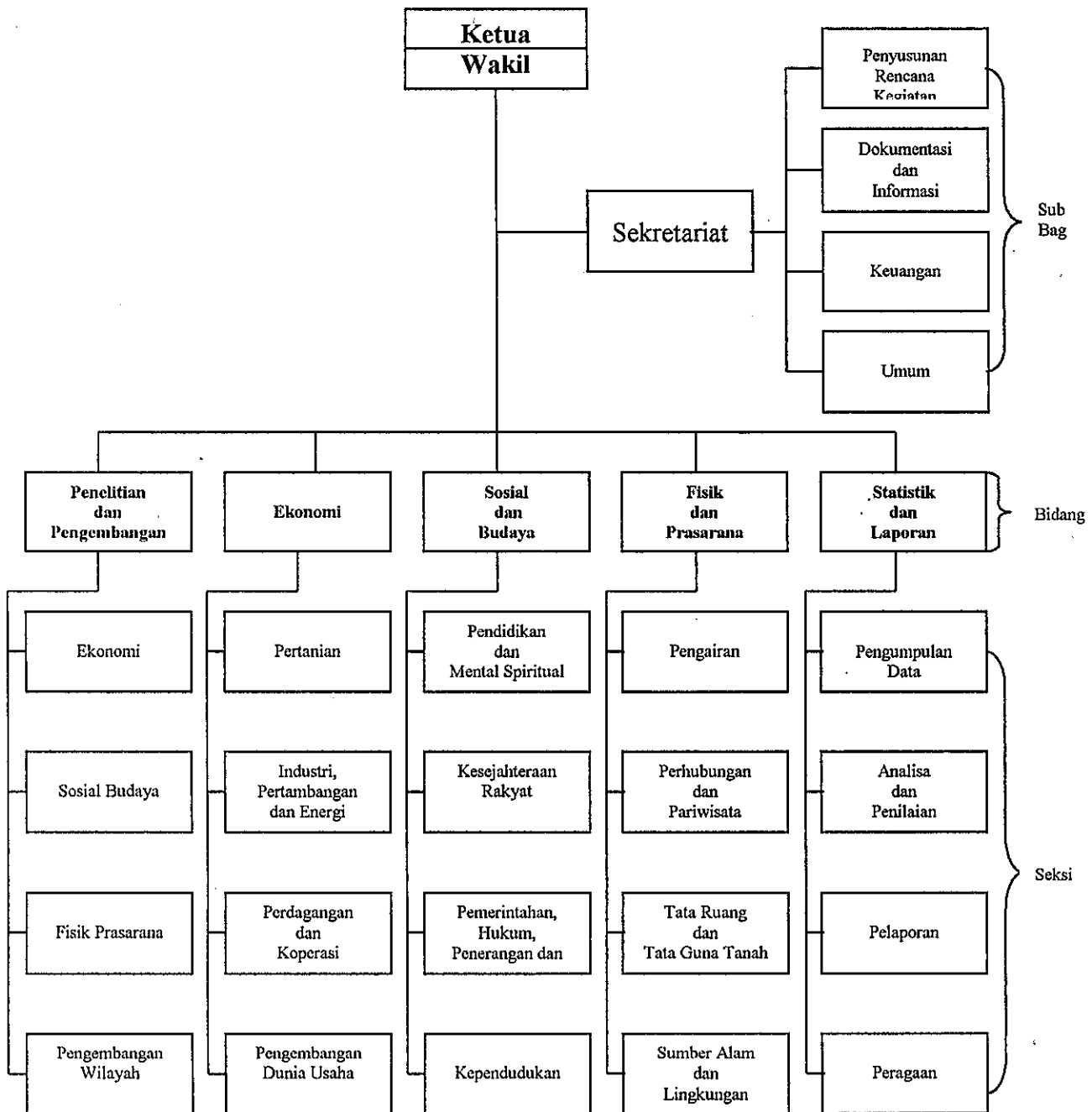
Untuk mendukung kedudukan dan peran unit perencana pembangunan daerah dalam tatanan pemerintah daerah, maka Bappeda Propinsi Jawa Tengah memiliki tatanan organisasi yang memungkinkan berfungsi secara utuh sebagai satu kesatuan institusional yang sekaligus juga serasi dengan lingkungan yang dilayaninya. Susunan organisasi Bappeda Propinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam ***Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981, Pasal 5*** adalah sebagai berikut :

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretariat, yang terbagi dalam 4 Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan; Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terbagi dalam 4 Seksi, yaitu : Seksi Ekonomi; Seksi Sosial dan Budaya; Seksi Fisik dan Prasarana; dan Seksi Pengembangan Wilayah.
5. Bidang Ekonomi, yang terbagi dalam 4 Seksi, yaitu : Seksi Pertanian; Seksi Industri, Pertambangan dan Energi; Seksi Perdagangan dan Koperasi; dan Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
6. Bidang Sosial dan Budaya, yang terbagi dalam 4 Seksi, yaitu : Seksi Pendidikan, Mental dan Spiritual; Seksi Kesejahteraan Rakyat; Seksi Pemerintahan, Hukum, Penerangan dan Komunikasi; dan Seksi Kependudukan.

7. Bidang Fisik dan Prasarana, yang terbagi dalam 4 Seksi, yaitu : Seksi Pengairan, Seksi Perhubungan dan Pariwisata; Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah; dan Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Bidang Statistik dan Laporan, yang terbagi dalam 4 Seksi, yaitu : Seksi Pengumpulan Data; Seksi Analisa dan Penilaian; Seksi Pelaporan; dan Seksi Peragaan.

Dari uraian tersebut terlihat, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah memiliki tatanan organisasional yang dapat memwadahi pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan daerah yang lebih adaktif dan integratif. Bagan struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Bagan Susunan Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Jawa Tengah



Dengan fokus pada penelitian dan pengembangan, maka kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Bappeda Propinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan berfungsi sebagai spesialis yang mendukung perencanaan hingga tingkat program melalui kajian, analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis. Untuk menyelenggarakan kegiatan dan tugas tersebut, fungsi-fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981, sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pembangunan di daerah.
2. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dan pengembangan wilayah serta mengadakan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga lainnya.
3. Menyiapkan rekomendasi penelitian yang beralokasi di daerah, menghimpun dan menyusun ringkasan laporan hasil penelitian yang diterima.

Teknis operasional fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan diselenggarakan oleh Seksi-Seksi sebagaimana yang diatur dalam ***Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 15 Tahun 1981, Pasal 14***, sebagai berikut :

1. Seksi Ekonomi.

Seksi Ekonomi mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangannya bagi perencanaan pembangunan di daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta mengadakan kerjasama penelitian dan pengembangan ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.

2. Seksi Sosial dan Budaya.

Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangannya bagi perencanaan pembangunan di daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta mengadakan kerjasama penelitian dan pengembangan sosial dan budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.

3. Seksi Fisik dan Prasarana.

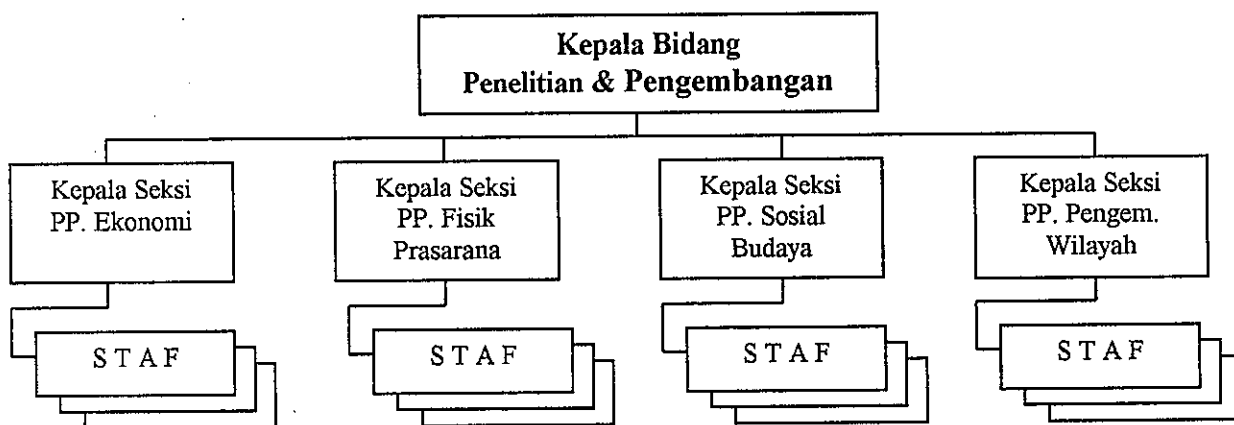
Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangannya bagi perencanaan pembangunan di daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta mengadakan kerjasama penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

4. Seksi Pengembangan Wilayah.

Seksi Pengembangan Wilayah mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangannya bagi perencanaan pembangunan di daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta mengadakan kerjasama penelitian dan pengembangan wilayah dengan lembaga-lembaga lainnya, khususnya dalam rangka penelitian pola tata ruang untuk pemanfaatan ruang/wilayah secara optimal sehingga diperoleh keterpaduan antar berbagai sektor.

Struktur organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah terlihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3.
Struktur Organisasi
Bidang Penelitian dan Pengembangan



B. VISI DAN MISI BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH.

Tuntutan pembangunan daerah sekarang ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum reformasi dan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Perubahan ini ditandai oleh kompleksnya permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan, besarnya skala pembangunan, kritisnya stake holders dan semakin tingginya peran masyarakat.

Perubahan-perubahan ini berlangsung cepat, tidak terduga, tidak linear dan tidak terkontrol. Sehubungan dengan itu, maka paradigma manajemen perencanaan pembangunan perlu dikaji ulang, visi, misi dan peran unit perencana perlu disesuaikan. Dalam era reformasi, tuntutan masyarakat atas pemerintah yang terbuka, bertanggungjawab, berdasarkan supremasi hukum, mengutamakan pelayanan publik, demokratis, konsisten, efektif dan efisien telah menjadi wacana baru dalam era pasca orde baru. Tuntutan yang sama juga ditujukan pada proses perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Proses perencanaan seperti tersebut diatas perlu segera diwujudkan sesuai dengan iklim reformasi. Disamping itu partisipasi dalam perencanaan pembangunan dapat digunakan sebagai instrumen

pemberdayaan dan peningkatan kesadaran rakyat terhadap akar politiknya. Sebagai pemikir strategik Bappeda dituntut sebagai inisiator dari berbagai gagasan perubahan dan pembaharuan. Tantangan besar yang muncul adalah membuat perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif, berorientasi pada hasil riset, pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan moral dan etika yang dianggap lemah pada masa-masa sebelumnya.

Sehubungan dengan itu dirumuskan visi dan misi Bappeda Propinsi Jawa Tengah sebagai petunjuk arah organisasi dimasa mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Visi.

Motor perubahan melalui perencanaan yang professional berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berlandaskan moral dan etika.

2. Misi.

- a. Membuat perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif, berorientasi pada hasil riset, pemberdayaan masyarakat berlandaskan moral dan etika.
- b. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur.
- c. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

- d. Mewujudkan produk perencanaan dan pengendalian yang mendukung kemandirian Jawa Tengah bersumber pada potensi yang mempunyai daya saing tinggi.
- e. Merumuskan kebijakan dan strategi serta mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan inisiatif perencanaan pembangunan.
- f. Mengendalikan strategi dan mewujudkan konsistensi dalam semua kegiatan perencanaan pembangunan.

C. KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

Kebijakan strategis pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2005 digariskan untuk dijadikan panduan guna menyelaraskan seluruh sektor dan program pembangunan dalam mendukung pembangunan daerah. Penggarisan kebijakan diambil berlandaskan pada kenyataan pengaruh perubahan lingkungan strategis, isu pokok yang mendesak dalam pembangunan daerah dan visi serta misi pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah. Kebijakan strategis yang telah digariskan sejauh-jauhnya telah diselaraskan dengan semua kebijakan sektor-sektor dan program-program pembangunan, termasuk kebijakan pembangunan program penelitian dan pengembangan.

Kebijakan strategis pembangunan daerah sebagaimana dimuat dalam Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2005, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan strategis bidang penanggulangan dampak krisis ekonomi dan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penanganan kemiskinan, kesempatan kerja dan perlindungan sosial.

a. Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu : (1) Bina manusia yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kebutuhan dasar; (2) Bina usaha yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin; dan (3) Bina lingkungan yang diarahkan pada upaya peningkatan sarana prasarana dan penciptaan lingkungan yang kondusif.

b. Peningkatan Kesempatan Kerja.

Kebijakan peningkatan kesempatan kerja difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk : (1) Membuka kesempatan lapangan kerja baru; (2) Meningkatkan kemampuan tenaga kerja; dan (3) Menumbuhkan budaya wirausaha pada masyarakat.

c. Perlindungan Sosial.

Kebijakan perlindungan sosial difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk menangani : (1) Pemenuhan kebutuhan pangan, gizi dan kebutuhan pokok lainnya; (2) Perlindungan sistim perlindungan kesehatan masyarakat; (3) Pengembangan subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin; dan (4) Peningkatan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

2. Bidang Peningkatan Persatuan, Kesatuan dan Kehidupan Demokratis serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kebijakan strategis bidang peningkatan persatuan, kesatuan dan kehidupan demokratis serta keamanan dan diarahkan untuk menangani permasalahan politik dan kamtibmas.

a. Politik.

Kebijakan politik difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu : (1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; (2) Fasilitasi kaderisasi pada organisasi politik; (3) Meningkatkan peran lembaga legislatif; dan (4) Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

b. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk : (1) Pembinaan kamtibmas;

- (2) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Peningkatan partisipasi rakyat terlatih melalui Mawil Hansip; dan (4) Peningkatan pemasyarakatan pendidikan pendahuluan bela negara.

3. Bidang Penegakan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Bersih.

Kebijakan strategis bidang penegakan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih diarahkan untuk menangani masalah penegakan supremasi dan aparatur pemerintah daerah.

a. Hukum dan Perundang-undangan.

Kebijakan hukum dan perundang-undangan difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu : (1) Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi daerah; (2) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum; dan (3) Penegakan dan penerapan supremasi hukum secara konsisten.

b. Aparatur Pemerintah Daerah.

Kebijakan aparatur pemerintah daerah difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu : (1) Penataan struktur organisasi perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah; (2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme

sumber daya manusia aparatur; (3) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; dan (4) Peningkatan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

4. Pemberdayaan Potensi dan Kapasitas Daerah serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Kebijakan strategis bidang pemberdayaan potensi dan kapasitas daerah serta pembangunan ekonomi berkelanjutan diarahkan untuk menangani masalah pembangunan ekonomi daerah dan wilayah serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui program-program prioritas sebagai berikut :

a. Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kebijakan penataan ruang dan pertanahan difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk : (1) Memantapkan perencanaan tata ruang; (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang; (3) Memasyarakatkan dan mensosialisasikan penataan ruang dan pelayanannya kepada masyarakat; (4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pertanahan; dan (5) Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah.

b. Pembangunan Wilayah.

Kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu : (1) Pembangunan kelembagaan sosial ekonomi yang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dan mendapatkan lapangan pekerjaan; (2) Pembangunan usaha pertanian untuk dapat mendorong percepatan perubahan struktur kegiatan ekonomi; (3) Pengembangan wilayah desa sebagai satuan potensi ekonomi, budaya dan pertahanan; (4) Pengembangan kelembagaan yang mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat desa; (5) Peningkatan sarana prasarana desa; (6) Peningkatan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia; (6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan; dan (7) Pengembangan teknologi tepat guna yang produktif dan adaptif.

c. Perhubungan.

Kebijakan perhubungan difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk : (1) Pengembangan sistim jaringan transportasi, penggunaan teknologi baru, keserasian moda angkutan dan sistim angkutan umum masal; (2) Peningkatan peran swasta dalam pembangunan sektor transportasi; dan (4) Peningkatan pengawasan & pemberdayaan hukum serta keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi.

d. Pekerjaan Umum.

Kebijakan pekerjaan umum difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk : (1) Peningkatan kapasitas, kemampuan struktur dan pemeliharaan kondisi jalan yang ada; (2) Pembukaan simpul-simpul kegiatan ekonomi; (3) Pengendalian banjir melalui pembuatan bangunan dan pengaturan air serta dengan eksploitasi dan pemeliharaan sungai secara rutin; (4) dan Pengelolaan jaringan irigasi sesuai Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang kebijakan pengelolaan irigasi.

e. Pertanian.

Kebijakan pertanian difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu untuk :(1) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan daerah; (2) Mengembangkan usaha pertanian, peternakan dan perikanan dengan pola agribisnis; (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan kecil menengah; dan (4) Meningkatkan kualitas dan kesediaan sumber daya alam untuk produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

f. Perindustrian dan Perdagangan.

Kebijakan perindustrian dan perdagangan difokuskan pada kegiatan prioritas yang terpadu melalui : (1) Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan; (2) Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan; dan (3) Pengelolaan laboratorium kemetrolgian.

g. Penanaman Modal.

Kebijakan penanaman modal difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Pengembangan sarana informasi dan promosi serta sarana prasarana pendukung investasi; (2) Penyederhanaan prosedur dan tata cara permohonan penanaman modal serta peningkatan pelayanan perijinan investasi; (3) Peningkatan aparatur pengelola penanaman modal; (4) Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi; (5) Pengembangan lembaga pusat pengembangan sumber daya Jawa Tengah.

h. Perikanan dan Kelautan.

Kebijakan perikanan dan kelautan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya melalui: (1) Inventarisasi potensi dan pemanfaatan kawasan pantai, pesisir dan laut; (2) Peningkatan Amdal terhadap kegiatan yang potensial merusak sumber daya kelautan; (3) Pengembangan prinsip-prinsip melindungi ekosistem pantai; (4) Pemberdayaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; dan (5) Pengembangan sistem penegakan hukum yang efektif termasuk menggali potensi hukum adat.

i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Perwujudan keserasian aktifitas pembangunan dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (2) Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; (3) Rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam; (4) Peningkatan kemitraan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengelola lingkungan; dan (5) Perwujudan produk-produk yang memenuhi standar ecolabelling dan clean production untuk menyongsong perdagangan bebas.

j. Pariwisata.

Kebijakan pariwisata difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Pembangunan sistem informasi wisata antar daerah di Jawa Tengah dan diluar Jawa Tengah; (2) Pembukaan jalur komunikasi wisata melalui berbagai sektor; (3) Penumbuhkembangan potensi kepariwisataan Jawa Tengah; dan (4) Pembentukan pola kerjasama berbagai sektor pembangunan dalam kegiatan promosi pariwisata.

k. Perkoperasian dan Pengusaha Kecil/Menengah.

Kebijakan perkoperasian dan pengusaha kecil/menengah difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Pengembangan produksi dan distribusi; (2) Penguatan struktur permodalan; (3) Penguatan, pengembangan kelembagaan koperasi dan PKM yang berbasis iptek, berciri lokal dan spesifik.

l. Pertambangan.

Kebijakan pertambangan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Evaluasi potensi bahan tambang secara menyeluruh; (2) Pengawasan pengendalian pertambangan; (3) Keterpaduan antar sektor dan wilayah dalam pengelolaan potensi tambang.

m. Energi.

Kebijakan energi difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Peningkatan kontribusi dalam pembangunan nasional; (2) Pengembangan usaha sesuai dengan kaitan ekonomi yang sehat; dan (3) Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi.

n. Kehutanan dan Perkebunan.

Kebijakan kehutanan dan perkebunan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi maupun hutan lindung; (2) Pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai dengan kondisi agro ekosistem wilayah; (3) Pembentukan wilayah dan perlindungan hukum pengelolaan hutan lindung; (4) Penetapan kawasan serta pengawasan perubahan fungsi dan status hutan; (5) Peningkatan kualitas hutan/kebun untuk menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup; (6) Pencegahan peningkatan luas lahan kritis; (7) Perluasan areal hutan/kebun untuk mendukung fungsi ekologi sekaligus meningkatkan produksi hutan/kebun; (8) Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam perlindungan dan pengamanan hutan; (9) Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora/fauna yang tidak dilindungi usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan; (10) Meningkatkan peranserta masyarakat sekitar hutan dalam pembangunan kehutanan/perkebunan; (11) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan kelompok tani; dan (13) Mengembangkan penelitian dan pengembangan iptek terapan bidang kehutanan dan perkebunan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya.

Kebijakan strategis bidang peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya diarahkan untuk menangani masalah pembangunan ketenagakerjaan, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan sosial.

a. Ketenagakerjaan.

Kebijakan ketenagakerjaan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja produktif bagi angkatan kerja tertentu; dan (2) Perluasan dan penciptaan lapangan kerja yang memadai kepentingan masyarakat untuk mengurangi pengangguran diberbagai sektor dan wilayah.

b. Agama.

Kebijakan agama difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Peningkatan dan memantapkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama; (2) Peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan; (3) Peningkatan pelayanan pelaksanaan haji; (4) Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan agama serta peningkatan mutu tenaga kependidikan agama.

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan teknologi yang mendasarkan diri pada visi, pengguna untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat penelitian dapat terasa secara meluas; (2) Membangun interaksi yang kuat antara peneliti dan pengguna untuk menjamin produk penelitian dan pengembangan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna yang didukung dengan penciptaan sistem informasi; (3) Memfasilitasi sistem informasi teknologi sehingga tercipta iklim informasi yang kondusif bagi peneliti, pencipta teknologi, pengambil kebijakan dan pengguna teknologi; dan (4) Memberikan fasilitas kepada pencipta teknologi dan inovasi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa hak atas kekayaan intelektual.

d. Kesehatan.

Kebijakan kesehatan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Pengembangan paradigma sehat; (2) Peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan; (3) Pengembangan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; (4) Peningkatan upaya kesehatan yang

promotif, preventif dan kuratif; (5) Peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan masyarakat; dan (6) Peningkatan pelayanan kesehatan.

e. Kependudukan.

Kebijakan kependudukan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Meningkatkan kualitas penduduk dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk; dan (2) Memperkecil angka kematian bayi, balita dan ibu.

f. Pemberdayaan perempuan.

Kebijakan pemberdayaan perempuan difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk dapat berperan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan; dan (2) Meningkatkan peran dan kemandirian organisasi perempuan untuk kesejahteraan keluarga.

g. Sosial.

Kebijakan sosial difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui : (1) Peningkatan aksesibilitas fisik dan non fisik untuk menciptakan perspektif penyandang cacat, lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya; (2) Peningkatan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin,

anak jalanan, terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja; dan (3) Perwujudan ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan, pembudayaan sosial dan bencana alam.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Kebijakan strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas daerah diarahkan untuk menangani masalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan otonomi daerah.

a. Pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Peningkatan kemampuan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat; (2) Memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat; (3) Mendorong kemandirian desa dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat desa; (4) Meningkatkan peran desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (5) Memperkuat struktur ekonomi, mempermudah arus informasi, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna.

b. Peningkatan otonomi daerah.

Kebijakan peningkatan otonomi daerah difokuskan pada kegiatan prioritas secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya melalui: (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah yang lebih profesional sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan sistem insentif yang memadai; (2) Peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang lebih adil dan proporsional, pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, dan mempertimbangkan keserasian alokasi bagi daerah yang miskin sumber daya alamnya dan terbelakang ekonominya; (3) Pengembangan struktur organisasi pemerintah daerah yang modern dan dijalankan oleh sumber daya yang mempunyai kompetensi dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik, produktifitas pelayanan masyarakat, perlindungan kepada masyarakat miskin, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta peningkatan partisipasi dan prakarsa masyarakat; dan (4) Peningkatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui penyediaan tenaga ahli yang diperbantukan, peningkatan kualitas masukan dalam rangka pengambilan keputusan legislasi kepada pemerintah yang efektif.

BAB IV

ANALISA DATA

Kebijaksanaan pembangunan program penelitian dan pengembangan sebagai bagian integral kebijaksanaan pembangunan sektor ilmu pengetahuan & teknologi yang tertuang dalam Propeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005, dimaksudkan untuk membuka peluang terpakainya paradigma baru penelitian dan pengembangan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan yang dianut harus didukung oleh strategi peningkatan kualitas penelitian & pengembangan sebagai suatu pendekatan dengan memperhatikan isu strategis, visi, misi, rencana strategis dan masalah-masalah pembangunan daerah yang mendesak. Strategi dimaksud diarahkan pada peningkatan kompetensi indikator-indikator yang mempengaruhi kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan pembangunan program penelitian dan pengembangan secara berkesinambungan. Indikator-indikator tersebut mengacu pada pendekatan teori yang telah dikembangkan pada Bab terdahulu, yaitu : (1) Rencana strategi penelitian dan pengembangan; (2) Sumber daya manusia penelitian dan pengembangan; (3) Organisasi penelitian dan pengembangan; dan (4) Sistim jaringan penelitian dan pengembangan.

Makna sebagai indikator penentu kualitas penelitian dan pengembangan, menjadikan indikator-indikator tersebut mempunyai pengaruh penting terhadap setiap upaya penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden, sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan penelitian & pengembangan yang dilakukan secara swakelola maupun yang dikoordinir oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1, menurut pendapat para responden urutan prioritas indikator yang menentukan kualitas penelitian, adalah sumber daya manusia penelitian dan pengembangan (100 %), rencana strategis penelitian dan pengembangan (90 %), organisasi penelitian dan pengembangan (53,3 %), dan sistim jaringan penelitian dan pengembangan (26,7 %).

Tabel 4.1
INDIKATOR PENENTU
KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
n = 30

No	Indikator	Frekuensi Jawaban			Prosentase		
		Ya	Tidak	Jml	Ya	Tidak	Jml
1	Renstra Litbang	27	3	30	90	10	100
2	SDM Litbang	30	0	30	100	0	100
3	Organisasi Litbang	16	14	30	53,3	46,7	100
4	Sistim Jaringan Litbang	8	22	30	26,7	73,3	100

Berkaitan dengan indikator penentu kualitas penelitian dan pengembangan, ada beberapa implikasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara swakelola oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 4.2, sebagian besar responden berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia penelitian pada Bappeda tidak memenuhi persyaratan standar seorang peneliti (90 %), baik dievaluasi dari aspek kemampuan metodologi penelitian maupun dari aspek kemampuan analisis penelitian. Demikian pula halnya dengan indikator rencana strategis penelitian, 73,3 % responden berasumsi bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian di Bappeda meskipun sudah mengacu pada isu strategis dan masalah pokok Jawa Tengah, sifatnya masih parsial dan tidak implementatif. Dengan demikian hasil-hasil penelitian tersebut relatif tidak dapat diakomodasikan kedalam perencanaan program-program pembangunan daerah.

Tabel 4.2
INDIKATOR YANG TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
n = 30

No	Indikator	Frekuensi Jawaban			Prosentase		
		Ya	Tidak	Jml	Ya	Tidak	Jml
1	Renstra Litbang	22	8	30	73,3	26,7	100
2	SDM Litbang	27	3	30	90	10	100
3	Organisasi Litbang	10	20	30	33,3	66,7	100
4	Sistim Jaringan Litbang	13	17	30	43,3	56,7	100

Dalam kerangka penerapan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan, maka dalam menentukan prioritas pengembangan dan peningkatan kompetensi indikator yang tidak memenuhi standar kualitas penelitian dan pengembangan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan sumber daya yang tersedia serta selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan rencana penelitian yang lebih operasional.

A. PELUANG DAN TANTANGAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

1. Peluang.

Perjalanan waktu memasuki milenium ketiga ternyata membawa pula pelbagai kesempatan bagi Jawa Tengah untuk meningkatkan peran litbang yang semula dipandang hanya sebagai pendukung pembangunan diubah sebagai mesin penggerak pembangunan. Ini antara lain diakibatkan oleh :

a. Paradigma baru litbang.

Paradigma baru pembangunan daerah membawa pada suatu tonggak baru yang membuka peluang untuk mengadakan perubahan mendasar di segala aspek manajemen pembangunan, termasuk pergeseran paradigma litbang yang bermula hanya

sebagai pelengkap dalam sistem manajemen pembangunan menjadi ujung tombak perencanaan pembangunan daerah yang strategis.

b. Potensi pengembangan organisasi litbang dalam peraturan baru.

Sebagai implikasi peningkatan otonomi daerah, melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 telah ditetapkan Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kebutuhan daerah.

c. Meningkatnya tuntutan stake holders.

Karena terbukanya sumber informasi modern, masyarakat telah dapat mengikuti perkembangan yang terjadi diluar daerah dan negaranya. Sebagai akibatnya tuntutan untuk ikut dapat menikmati barang dan jasa yang diproduksi dengan teknologi modern dengan lebih mendasarkan pada litbang ikut pula meningkat.

d. Perluasan bidang utama penelitian sesuai dengan Propeda.

Semakin strategisnya peran litbang diwaktu mendatang, memberikan peluang yang sistematis untuk memperluas bidang-bidang utama penelitian, yang sesuai dengan Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005.

- e. Meluasnya penggunaan teknologi internet.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini dunia menyaksikan kepesatan laju kemajuan teknologi internet yang tidak ada tolok bandingannya sebelumnya dalam sistim jaringan kerja. Karena pelbagai kendala lekat diri, kemajuan pesat itu belum sepenuhnya terkejar dalam upaya peningkatan kualitas litbang. Sekalipun demikian kepesatan kemajuan itu memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas litbang melalui keterpaduan jaringan dalam satu sistim yang terkoordinasi dan terfokus dengan baik.

2. Tantangan.

Dalam melaksanakan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan, beberapa tantangan perlu diperhatikan dan sekaligus dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan strategis tersebut.

- a. Pembangunan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia penelitian, baik SDM perencana litbang maupun pelaksana penelitian menjadi tantangan atau ancaman yang paling utama. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas peneliti yang dimiliki oleh Bappeda maupun komposisi SDM perencana litbang yang tidak sepadan dengan rencana peningkatan organisasi serta peran litbang dimasa yang akan datang.

b. Pendinamisan momentum pembangunan.

Sejalan dengan upaya mengatasi dampak krisis multi dimensional dan gerakan reformasi yang berimplikasi pada pelbagai perubahan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan, tantangan utama yang dihadapi adalah melakukan pengkajian-pengkajian yang menelaah pelbagai perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kelemahan struktur dan kelembagaan yang perlu diatasi secara berkelanjutan untuk mengukuhkan landasan pembangunan daerah.

c. Perubahan-perubahan lingkungan strategis.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sebagaimana diungkapkan diatas menghendaki penyesuaian, reorientasi dan strategi kebijakan penelitian dan pembangunan yang lebih berperan sebagai mata tombak pembangunan yang berarti efektif memberikan masukan bagi pelaksanaan program dan pemecahan masalah pembangunan daerah. Sesuai dengan isu strategis serta memperhatikan kendala tantangan, peluang dan sumber daya yang tersedia.

d. Pemanfaatan dan pengembangan iptek dan riset.

Pemantapan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi termasuk penelitian dan pengembangan, merupakan langkah-langkah yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun Propinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan paradigma baru. Tantangan yang dihadapi saat ini dan masa datang adalah

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, antara lain karena peran keilmuan tertentu merupakan landasan untuk meningkatkan terciptanya inovasi dan kelancaran difusi teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

- e. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan daerah diyakini akan semakin dipercepat keberhasilannya oleh dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi pada produksi daerah melalui kegiatan penelitian beserta dukungan faktor-faktor sumber daya manusia, manajemen penelitian, dana dan prasarana untuk meningkatkan terciptanya inovasi dan memperlancar difusi teknologi yang langsung diterapkan di lapangan.

B. KEKUATAN DAN KELEMAHAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

1. Kekuatan Strategi Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan.

1.1. Rencana Strategi Penelitian dan Pengembangan.

Kebijakan penelitian dan pengembangan yang dijabarkan dalam rencana strategis (renstra) penelitian dan pengembangan

mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah pembangunan daerah, karena renstra tersebut disusun dengan mendasarkan pada isu-isu strategis. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian besar responden sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 4.3, sebagai berikut :

Tabel 4.3
RENSTRA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
MENGACU PADA ISU-ISU STRATEGIS

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	19	63,3
2.	Tidak	11	36,7
-	JUMLAH	30	100

Kemampuan renstra penelitian dan pengembangan dalam mendukung pemecahan masalah pokok pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut antara lain diimplementasikan dalam kemampuan produk riset saat ini mencakup 4 (empat) bidang utama, yaitu : (1) Bidang Sosial Budaya; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Fisik Prasarana; dan (4) Bidang Pengembangan Wilayah. Secara keseluruhan bidang-bidang utama tersebut diarahkan untuk menunjang kualitas penelitian dan pengembangan, sehingga hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Bidang-bidang utama penelitian dan pengembangan cakupan programnya luas dan kompleks sesuai dengan ragam sektor / sub sektor / program pembangunan daerah. Bidang-bidang utama tersebut menjadi pilar utama kekuatan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan dengan memaparkan terbentuknya sistim informasi daerah yang berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan. Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang bidang dan program litbang yang dikelola atau dilaksanakan Bappeda Propinsi Jawa Tengah dalam tahun 1997-2000 dapat dilihat pada Tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel 4.4
BIDANG UTAMA DAN PROGRAM-PROGRAM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPEDA
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1997-2000

NO	BIDANG	PROGRAM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan • Pendidikan • Kesejahteraan Rakyat • Kependudukan • Peranan Wanita 	Dari 24 program litbang Bidang Sosial Budaya, baru direalisasikan 5 program.
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Usaha Daerah • Pertanian • Industri • Keuangan Daerah 	Dari 12 program litbang Bidang Ekonomi, baru direalisasikan 4 program.
3.	Fisik Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Guna Ruang • Pengairan • Perhubungan • Sumberdaya Alam • Teknologi Budidaya 	Dari 11 program litbang Bidang Fisik Prasarana, baru direalisasikan 5 program.
4.	Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Pembangunan • Wilayah Perkotaan 	2 program dapat direalisasikan seluruhnya.

1.2. Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan.

Kemampuan sumber daya manusia Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah didukung oleh 27 personil, yang terbagi dalam formasi staf teknis perencanaan yang handal dengan komposisi pendidikan formal setara S-2 sebanyak 2 orang atau 7,40 %, setara S-1 sebanyak 20 orang atau 74,07 % dan staf teknis administrasi dengan pendidikan formal D-3, SLTA dan SLTP sebanyak 5 orang atau 18,51 %. Data jumlah sumber daya manusia Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Propinsi Jawa Tengah menurut pendidikan pada periode tahun 1997-2000 dapat dilihat dalam Tabel 4.5, sebagai berikut :

Tabel 4.5
DATA PEGAWAI BIDANG LITBANG
BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH MENURUT
PENDIDIKAN TAHUN 1997-2000

NO	TAHUN	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	JUMLAH
1	1997	1	8	1	18	2	-	30
2	1998	1	5	1	21	2	-	30
3	1999	1	4	1	19	2	-	27
4	2000	1	3	1	20	2	-	27

Sumber Data :

Bappeda Propinsi Jawa Tengah
Januari 2000

Dalam hubungannya dengan penempatan pegawai pada jabatan struktural dan non struktural serta fungsional di lingkungan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Propinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 4.6, sebagian besar responden menyatakan bahwa penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tersebut telah sesuai dengan pendidikan formal dan pendidikan & pelatihan struktural yang dimiliki serta pernah diikuti oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan (63,3 %). Sedangkan sebagian responden lainnya berpendapat, bahwa penempatan pegawai pada jabatan struktural, non struktural dan fungsional tersebut tidak sesuai dengan pendidikan formalnya, tetapi lebih sesuai dengan pendidikan dan pelatihan struktural serta teknis fungsional yang dimiliki oleh para pegawai yang bersangkutan (36,7 %).

Tabel 4.6
PENEMPATAN SDM BIDANG LITBANG SESUAI DENGAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN KLASIFIKASI JABATAN

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Tidak	19	36,7
2.	Ya	11	63,3
-	JUMLAH	30	100

Berkaitan dengan jumlah dan komposisi pendidikan formal SDM Bappeda Propinsi Jawa Tengah, maka jumlah dan komposisi pendidikan formal SDM Bidang Litbang yang sama dengan SDM bidang-bidang lainnya merupakan faktor kekuatan yang

signifikan untuk dapat mendukung strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan. Hal ini dimungkinkan, karena Bidang Litbang hanya mempunyai beban tanggungjawab tugas pokok dan fungsi 1 sektor pembangunan (sektor ilmu pengetahuan dan teknologi), sedangkan 4 bidang perencanaan lainnya yang mempunyai beban tanggungjawab tugas pokok dan fungsi 20 sektor pembangunan. Dengan demikian Bidang Litbang dapat lebih memfokuskan kinerjanya pada keberhasilan pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang komposisi SDM Bappeda, lihat Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
DATA PEGAWAI BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 1997-2000

NO	TAHUN	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	JML
1	1997	20	62	18	128	4	-	232
2	1998	20	52	18	123	5	-	218
3	1999	20	52	17	133	9	-	231
4	2000	18	46	20	130	13	1	228

Sumber Data :

Bappeda Propinsi Jawa Tengah
Januari 2001

1.3. Kompetensi Organisasi dan Kelembagaan Penelitian.

1.3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981, susunan organisasi dan tata kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur

penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda telah mampu melaksanakan fungsi utamanya, sebagai berikut :

- Merumuskan kebijakan litbang daerah lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Litbang Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005.
- Merumuskan kebijakan litbang daerah tahunan, yaitu Daftar Skala Prioritas Litbang Tahunan.
- Melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh sebagian besar responden sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 4.8, bahwa Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai bidang perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta mampu mendukung tugas pokok dan fungsi bidang-bidang lainnya di lingkungan Bappeda (60 %).

Tabel 4.8
BIDANG LITBANG Mendukung Pelaksanaan TUPOKSI Bidang-bidang Lainnya di Lingkungan Bappeda

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	18	60
2.	Tidak	12	40
-	JUMLAH	30	100

Dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian Dinas/Instansi dan Perguruan Tinggi, seperti yang tersaji dalam Tabel 4.9, sebagian besar responden menyatakan bahwa Bidang Litbang dapat melaksanakan fungsi koordinasi tersebut secara berkala dan berkelanjutan melalui forum rapat koordinasi, dengan pendapat maupun forum focus group discussion (73,3 %).

Tabel 4.9
BIDANG LITBANG DAPAT MELAKUKAN KOORDINASI
PENELITIAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PENELITIAN
DINAS/INSTANSI DAN PERGURUAN TINGGI

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	22	73,3
2.	Tidak	8	26,7
-	JUMLAH	30	100

Berkaitan dengan mekanisme kerja organisasi seperti yang tersaji dalam Tabel 4.10, sebagian besar responden menyatakan bahwa Bidang Litbang dalam menjalankan tugas pokoknya selama ini mampu menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (56,7 %).

Tabel 4.10
BIDANG LITBANG DAPAT MEMPERSIAPKAN
BAHAN MASUKAN BAGI PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	17	56,7
2.	Tidak	13	43,3
-	JUMLAH	30	100

Kemampuan menjalankan fungsi-fungsi organisasi tersebut menjadi kekuatan yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah. Apabila dicermati pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dalam periode tahun 1997-2000, mencerminkan upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan cakupan kegiatan penelitian pada sektor-sektor lainnya. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan Bappeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2000 dapat dilihat pada Tabel 4.11, sebagai berikut :

Tabel 4.11
DATA JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1997-2000

NO	BIDANG	1997	1998	1999	2000	JML
1	Sosial Budaya	4	-	1	2	7
2	Ekonomi	3	-	-	2	5
3	Fisik Prasarana	4	-	-	2	6
4	Pengembangan Wilayah	4	-	1	1	6
	Jumlah	15	-	2	7	24

Sumber Data :

Bappeda Propinsi Jawa Tengah
 Januari 2001

1.3.2. Anggaran Penelitian dan Pengembangan.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sejalan dengan dinamika pembangunan, memerlukan sistem pendanaan yang berkelanjutan dan dana tersedia pada saat dibutuhkan. Penyediaan dana selama ini sebagian besar bersumber dari anggaran pembangunan daerah dan bantuan yang bersifat stimulan dari anggaran pembangunan dan belanja negara. Anggaran penelitian yang diterima dari sumber-sumber diatas digunakan untuk melakukan koordinasi perencanaan dan operasional penelitian. Sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 4.12, sebagian besar responden menyatakan bahwa dukungan anggaran daerah untuk pelaksanaan kegiatan penelitian Bappeda Propinsi Jawa

Tengah sudah memadai dan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kualitas penelitian yang dihasilkan (73,3 %). Sedangkan sebagian responden lainnya menyatakan anggaran tersebut tidak memadai untuk menghasilkan penelitian dengan kualitas yang memenuhi standar kebutuhan perencanaan pembangunan.

Tabel 4.12
ANGGARAN LITBANG
DAPAT MENDUKUNG PELAKSANAAN LITBANG
BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	22	73,3
2.	Tidak	8	26,7
-	JUMLAH	30	100

Selanjutnya jumlah anggaran pembangunan Propinsi Jawa Tengah yang cukup tinggi, merupakan kekuatan yang dapat diandalkan untuk mendukung pelaksanaan strategi peningkatan kualitas Litbang. Kepmendagri No. 176 Tahun 1996 tentang dukungan APBD dalam kegiatan penelitian di daerah, menetapkan dukungan APBD untuk kegiatan penelitian di daerah sebesar 1 % dari jumlah total anggaran pembangunan daerah. Dukungan APBD Propinsi Jawa Tengah untuk kegiatan penelitian selama ini masih dibawah 1 %, oleh karena itu Kepmendagri tersebut perlu

segera direalisasikan melalui pemahaman bersama akan arti penting kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah. Perbandingan APBD Propinsi Jawa Tengah dengan anggaran Litbang selama periode tahun 1997-2000 dapat dilihat pada Tabel 4.13, sebagai berikut :

Tabel 4.13
PERBANDINGAN APBD PROPINSI JAWA TENGAH
DENGAN ANGGARAN PENELITIAN PADA
BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1997-2000

NO	TAHUN	APBD PROP. JATENG	ANGGARAN LITBANG	%
1	1997	247.163.088.000	625.000.000	0,25
2	1998	167.385.013.000	-	-
3	1999	240.757.909.000	90.000.000	0,04
4	2000	333.109.670.000	453.500.000	0,14

1.4. Sistim Jaringan Penelitian dan Pengembangan.

Selama ini Bidang Litbang Bappeda Propinsi Jawa Tengah mengalami berbagai keterbatasan untuk menangani bidang-bidang riset yang diprioritaskan, sehingga mempengaruhi pula kualitas riset yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain Bappeda membangun sistim jaringan penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi, badan-badan penelitian instansi pemerintah dan pusat-pusat kajian lembaga swadaya masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Seperti yang tersaji dalam Tabel 4.14, sebagian

besar responden menyatakan pula bahwa kualitas penelitian dan pengembangan Bappeda perlu didukung oleh sistim jaringan penelitian (96,7 %).

Tabel 4.14
KUALITAS LITBANG
PERLU DIDUKUNG OLEH SISTIM JARINGAN PENELITIAN

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	29	96,7
2.	Tidak	1	3,3
-	JUMLAH	30	100

Sistim jaringan penelitian yang dikembangkan Bappeda saat ini melalui program-program kerjanya telah mampu membangun suatu sistim yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai disiplin dan institusi dalam satu sistim. Disamping itu melalui jaringan penelitian ini dapat diperoleh hasil dan efisiensi pelaksanaan penelitian yang diharapkan dalam waktu yang lebih singkat apabila ditangani oleh berbagai disiplin ilmu dan institusi yang terkait. Berdasarkan pendapat 66,7 % responden seperti yang tergambar dalam Tabel 4.15, bahwa kelemahan dan keterbatasan suatu institusi, disiplin atau metode dapat teratasi melalui suatu kerjasama dalam sistim jaringan penelitian yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi kekuatan yang cukup berarti

untuk mendukung pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.15
KELEMAHAN PELAKSANAAN LITBANG
DAPAT DIELIMINIR MELALUI KERJASAMA
DALAM SISTIM JARINGAN PENELITIAN

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	20	66,7
2.	Tidak	10	33,3
-	JUMLAH	30	100

2. Kelemahan Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan.

2.1. Kebijakan Penelitian.

Kebijakan penelitian dan pengembangan selama ini masih bersifat sentralistik dan perencanaannya belum terdesentralisasi secara berimbang pada stake holder. Bidang-bidang utama penelitian meskipun sudah mengacu pada isu strategis dan masalah pokok pembangunan daerah, masih belum dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan penelitian pada seluruh program-program pembangunan. Dalam reorientasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang akan datang, bidang utama penelitian harus menyesuaikan 6 (enam) agenda pembangunan

Propinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Propeda. Keterbatasan: pengembangan program-program penelitian bidang utama pada periode tahun 1997 – 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4.16
DATA PROGRAM PENELITIAN & PENGEMBANGAN
BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1997 – 2000

NO	BIDANG	PROGRAM	1997	1998	1999	2000	JML
1	Sosial Budaya	a. Pemerintahan	1	-	-	1	2
		b. Pendidikan	2	-	-	-	2
		c. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	1	1
		d. Kependudukan	-	-	1	-	1
		e. Peranan Wanita	1	-	-	-	1
2	Ekonomi	a. Pengembangan Dunia Usaha	1	-	-	-	1
		b. Pertanian	1	-	-	-	1
		c. Industri	1	-	-	-	1
		d. Keuangan Daerah	-	-	-	2	2
3	Fisik Prasarana	a. Tataguna Ruang	1	-	-	-	1
		b. Pengairan	1	-	-	-	1
		c. Perhubungan	1	-	-	1	2
		d. Sumber Daya Alam	1	-	-	-	1
		e. Teknologi Budidaya	-	-	-	1	1
4	Pengembangan Wilayah	a. Wilayah Pembangunan	1	-	-	1	2
		b. Wilayah Perbatasan	2	-	-	-	2
		c. Kawasan Khusus	1	-	1	-	2
Jumlah			15	-	2	7	24

Sumber Data :
Bappeda Propinsi Jawa Tengah
Januari 2001

Dalam kebijakan penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan pada Renstra litbang saat ini, juga belum

mendasarkan pada Propeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-20005. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian responden yang tergambar dalam Tabel 4.17, dinyatakan bahwa Renstra Litbang belum mengacu pada Propeda Propinsi Jawa Tengah (56,7 %).

Tabel 4.17
RENSTRA LITBANG
MENGACU PADA PROPEDA JAWA TENGAH 2001-2005

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	13	43,3
2.	Tidak	17	56,7
-	JUMLAH	30	100

2.2. Sumber Daya Manusia Penelitian.

Kemampuan SDM Bidang Litbang yang menduduki jabatan struktural menjadi kendala atau kelemahan dalam upaya pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di Bappeda Propinsi Jawa Tengah. Meskipun dari sisi pendidikan formal SDM tersebut telah memenuhi syarat-syarat jabatan, tetapi dari sisi pendidikan teknis dan fungsional oleh sebagian besar responden tidak memenuhi persyaratan. Keadaan ini berimplikasi pada stagnasi pengembangan tupoksi Bidang Litbang. Sebagaimana yang tergambar pada Tabel 4.18, sebagian besar responden menyatakan SDM yang menduduki jabatan struktural pada bidang Litbang tidak dapat menjalankan

tupoksinya. Sebagai konsekuensi keadaan tersebut berdampak pada hasil perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang unacceptable bahkan cenderung unalienable bagi program-program pembangunan.

Tabel 4.18
PEJABAT STRUKTURAL BIDANG LITBANG
DAPAT MENJALANKAN TUPOKSINYA

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	10	33,3
2.	Tidak	20	66,7
-	JUMLAH	30	100

Keterbatasan sumber daya peneliti pada berbagai bidang studi penelitian mengakibatkan kemampuan riset menjadi tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan riset yang diperlukan. Bidang-bidang studi penelitian seperti antara lain biologi, bioteknologi, lingkungan, kelautan, perikanan dan sebagainya yang tidak dimiliki oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah merupakan masalah mendesak yang harus ditangani, karena akan menghambat strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Saat ini Bappeda hanya memiliki 8 (delapan) pejabat fungsional peneliti dengan bidang studi administrasi pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Untuk komposisi jabatan fungsional peneliti, Bappeda hanya memiliki 2 (dua) orang peneliti, sedangkan yang lainnya masih bersifat

pembantu peneliti. Secara lengkap data jumlah jabatan fungsional peneliti dan bidang studi penelitian pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah periode Tahun 1997 – 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.19 dan 4.20, sebagai berikut :

Tabel 4.19
DATA JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1997 – 2000

NO	JENIS	1997	1998	1999	2000
1	Peneliti Muda	-	2	2	4
2	Peneliti Madya	-	-	1	1
3	Asisten Peneliti Muda	-	-	3	2
4	Ajun Peneliti Muda	-	2	-	1
	Jumlah	-	4	6	8

Sumber Data :
Bappeda Propinsi Jawa Tengah
Januari 2001

Tabel 4.20
DATA JUMLAH BIDANG STUDI PENELITIAN
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1997 – 2000

NO	BIDANG STUDI	1997	1998	1999	2000
1	Biologi, Bioteknologi, Lingkungan	-	-	-	-
2	Matematika, Kimia, Fisika, Program Komputer	-	-	-	-
3	Kedokteran, Kesehatan, Kehutanan	-	-	-	-
4	Pertanian, Perikanan, Kehutanan	-	-	-	-
5	Keteknikan	-	-	-	-
6	Kebumian	-	-	-	-
7	Administrasi Pembangunan	-	-	1	1
8	Ekonomi (Manajemen, Akun- tansi, dsb)	-	-	-	-
9	Sosial, Hukum, Agama. Pemerintahan	-	4	5	7
	Jumlah	-	4	6	8

Sumber Data :
Bappeda Propinsi Jawa Tengah
Januari 2001

2.3. Organisasi Penelitian.

2.3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

SOT Bidang Litbang sebagai sub unit organisasi Bappeda Propinsi Jawa Tengah saat ini cenderung tidak dapat meningkatkan kemampuannya sebagai organisasi penelitian yang lebih dinamik, efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan serta sasaran penelitian dan pengembangan daerah. SOT Bidang Litbang juga menjadi penghambat untuk meningkatkan koordinasi perencanaan litbang secara lebih komprehensif, karena adanya kendala otoritas, delegasi wewenang dan eselonisasi dalam pelaksanaan fungsi koordinasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat 63,3 % responden yang menyatakan, bahwa SOT Bidang Litbang saat ini tidak dapat mendukung pengembangan manajemen penelitian yang lebih komprehensif. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya wewenang dan otoritas pengelolaan, pengembangan sumber daya penelitian yang dimiliki. Pendapat responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.21, sebagai berikut :

Tabel 4.21
SOT BIDANG LITBANG SAAT INI DAPAT
MENDUKUNG PENGEMBANGAN
KEGIATAN LITBANG

NO	MATERI JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	%
1.	Ya	11	36,7
2.	Tidak	19	63,3
-	JUMLAH	30	100

Kondisi ini menjadi salah satu kelemahan yang menghambat strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan secara luas. Oleh karena itu dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang antara lain mengatur tentang pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Propinsi, merupakan langkah taktis dan strategis serta sangat mendasar untuk meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan litbang sebagai ujung tombak pembangunan.

2.3.2. Anggaran Penelitian dan Pengembangan.

Investasi litbang yang tidak memadai terlihat dari sangat terbatasnya anggaran pembangunan daerah yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan litbang pembangunan daerah. Telah diuraikan pula dimuka bahwa penelitian sangat ditentukan oleh kebutuhan stake

holders, tetapi pada kenyataan yang dihadapi saat ini peran swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan daerah sangat terbatas sekali. Kondisi-kondisi ini antara lain yang akan menjadi penghambat pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mendukung kegiatan Litbang tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13 tentang Perbandingan APBD Propinsi Jawa Tengah dengan Anggaran Penelitian pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

2.4. Sistem Jaringan Penelitian dan Pengembangan.

Kelemahan sistem jaringan penelitian dan pengembangan saat ini masih bersifat sektoral serta belum mengarah pada pendekatan yang lebih sinergis dengan memadukan sektor-sektor lainnya atau pendekatan yang lebih terpadu mencakup berbagai disiplin dan institusi dalam suatu sistem. Kelemahan dan keterbatasan suatu disiplin, metode dan atau institusi sektoral dapat teratasi melalui suatu kerjasama dalam sistem jaringan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang lebih efektif serta efisien.

C. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH.

Formulasi strategi atau yang biasanya disebut dengan rencana strategi merupakan proses penyusunan perencanaan jangka menengah atau jangka panjang. Dalam memformulasikan rencana strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah, prosesnya lebih banyak menekankan pada penggunaan analisis SWOT terhadap faktor-faktor internal dan eksternal Bappeda yang signifikan mempengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil penelitian selama ini. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi, sehingga sesuai dengan misi, sasaran serta kebijakan pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

1. Faktor Strategi Eksternal.

Faktor strategi eksternal diidentifikasi berdasarkan analisis peluang dan ancaman yang diberi bobot dan rating serta total skor sesuai dengan besar serta kecilnya pengaruh faktor tersebut pada peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah yang akan datang.

Cara-cara penentuan Tabel 4.22 Matrik Faktor Strategi Eksternal, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam kolom 1 disusun 5 peluang dan 5 ancaman.
- b. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
- c. Menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (out standing) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi Bappeda. Pemberian nilai Rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi Rating + 4, tetapi jika peluangnya kecil diberi Rating + 1). Pemberian nilai Rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya jika nilai ancamannya sangat besar, Ratingnya adalah 1. Sebaliknya jika nilai ancamannya sedikit, Ratingnya 4.
- d. Untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4, bobot pada kolom 2 dikalikan dengan Rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (out standing) sampai dengan 1,0 (poor).
- e. Kolom 5 diisi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- f. Jumlah skor pembobotan pada kolom 4, merupakan total skor pembobotan bagi organisasi Bappeda. Nilai total ini menunjukkan bagaimana Bappeda bereaksi terhadap faktor-faktor eksternalnya.

Tabel 4.22
MATRIK FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL
YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LITBANG
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
A. PELUANG :				
1. Paradigma baru litbang	0,20	4	0,80	Reposisi peran litbang
2. Potensi pengembangan organisasi dalam peraturan baru	0,20	4	0,80	Peningkatan organisasi litbang
3. Meningkatnya tuntutan stake holders	0,15	4	0,60	Kualitas hasil litbang
4. Perluasan bidang utama litbang	0,15	3	0,45	Perluasan program litbang
5. Meluasnya penggunaan internet dalam jaringan litbang	0,10	3	0,30	Pengenalan teknologi internet untuk jaringan litbang
B. TANTANGAN/ANCAMAN :				
1. Perubahan lingkungan strategis	0,05	2	0,10	Reorientasi Renstra litbang
2. Pengembangan SDM	0,05	2	0,10	Peningkatan kualitas SDM litbang
3. Pendinamisan momentum pembangunan	0,05	2	0,10	Tantangan baru perencanaan litbang
4. Pemanfaatan dan pengembangan iptek & riset	0,03	1	0,03	Sosialisasi hasil litbang
5. Peningkatan kualitas litbang	0,02	1	0,02	Prioritas rencana strategi litbang
TOTAL	1,0	-	3,30	

2. Faktor Strategi Internal.

Faktor strategi internal diidentifikasi berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang selanjutnya diberi bobot dan rating serta total skor sesuai dengan besar serta kecilnya pengaruh faktor tersebut pada keadaan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda saat ini.

Cara-cara penentuan Tabel 4.23 Matrik Faktor Strategi Internal, dalam kerangka kekuatan dan kelemahan, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun masing-masing 5 faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Bappeda dalam kolom 1.
- b. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategi Bappeda. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.
- c. Menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (out standing) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi Bappeda. Variabel yang bersifat positif (semua variabel kekuatan) diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik). Sedangkan variabel yang bersifat negatif (kelemahan) kebalikannya.
- d. Faktor pembobotan pada kolom 4 merupakan perkalian bobot pada kolom 2 dengan Rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi dari 4,0 sampai dengan 1,0.
- e. Kolom 5 diisi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- f. Jumlah skor pembobotan pada kolom 4 menunjukkan bagaimana Bappeda bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

Tabel 4.23
MATRIK FAKTOR STRATEGI INTERNAL
YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LITBANG
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	LATINE	BOBOT X RATING	KOMENTAR
A. KEKUATAN :				
1. Renstra mengacu isu strategis	0,15	4	0,60	Meningkatkan peran litbang
2. Kualitas aparat perencana litbang tinggi	0,15	4	0,60	Konsistensi perencanaan litbang
3. Bidang utama litbang mendukung perencanaan pembangunan	0,10	3	0,30	Efektifitas hasil litbang
4. Dukungan Anggaran pemerintah daerah	0,15	3	0,45	Sumber pembiayaan litbang tersedia
5. Mempunyai jaringan lembaga penelitian	0,10	3	0,30	Meningkatkan jaringan kerja litbang
B. KELEMAHAN :				
1. Terbatasnya program bidang utama	0,05	2	0,10	Pengembangan program litbang
2. Jaringan litbang masih sektoral	0,05	2	0,10	Perluasan jaringan lintas sektoral
3. Kualitas peneliti rendah	0,10	1	0,10	Peningkatan kualitas peneliti
4. Kebijakan litbang sentralistik	0,05	1	0,05	Desentralistik kebijakan litbang
5. Terbatasnya otoritas, wewenang dan eselonisasi dalam koordinasi	0,10	1	0,10	Pengembangan organisasi litbang
TOTAL	1,00	-	2,70	-

3. Penentuan Posisi dan Alternatif Strategi Peningkatan Kualitas Penelitian & Pengembangan.

Untuk menentukan posisi dan alternatif strategi peningkatan kualitas penelitian & pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah, dilakukan analisis total skor faktor eksternal dan analisis total skor faktor internal dengan menggunakan Model Internal-Eksternal Matrik, sebagai berikut :

Gambar 4.1
MATRIK INTERNAL-EKSTERNAL
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LITBANG
PADA BAPPEDA PROPINSI JAWA TENGAH

		KEKUATAN INTERNAL		
		HIGH (3-4)	MEDIUM (2-3)	LOW (1-2)
KEKUATAN EKSTERNAL	HIGH (3-4)	GROWTH Konsentrasi melalui integrasi vertikal	GROWTH Konsentrasi melalui integrasi horizontal	RETRENCHMENT Strategi turn-around
	MEDIUM (2-3)	STABILITY	GROWTH Konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stability profit strategi	RETRENCHMENT Strategi divestasi
	LOW (1-2)	GROWTH Difersifikasi konsentrik	GROWTH Difersifikasi konglomerat	LIKUIDASI

Berdasarkan Internal-Eksternal Matrik pada Gambar 4.1 dengan nilai total skor IFAS 2,70 dan nilai total skor EFAS 3,30, maka diketahui posisi kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda saat ini berada pada kelompok growth strategy dengan alternatif strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal.

Alternatif strategi yang tepat pada posisi pertumbuhan dengan integrasi horizontal, adalah melakukan tindakan konsolidasi faktor-faktor internal untuk memanfaatkan peluang dari faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap rencana strategi peningkatan

kualitas litbang, antara lain dengan melakukan kegiatan penguatan atau pengembangan kelembagaan litbang, pengembangan kemampuan sumber daya manusia litbang, reorientasi kebijaksanaan litbang yang lebih membumi pada masalah agenda pembangunan daerah, pengembangan fasilitas jaringan kerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Tujuan strategi ini lebih relatif defensif dengan melakukan pengembangan internal yang difokuskan pada tingkat organisasi secara keseluruhan untuk mengembangkan dan meningkatkan citra litbang yang dilaksanakan maupun dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

4. Alternatif Strategi yang Dipilih Untuk Peningkatan Kualitas Penelitian & Pengembangan.

4.1. Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan.

- 1) Peningkatan kualitas aparat perencana penelitian dan pengembangan, baik yang aparat struktural maupun non struktural melalui program pendidikan teknis fungsional perencanaan.

- 2) Peningkatan kualitas aparat peneliti melalui kursus-kursus jangka pendek dan program pendidikan teknis fungsional penelitian.
- 3) Rekrutmen tenaga fungsional peneliti sesuai dengan persyaratan kualitas dan bidang studi penelitian yang dibutuhkan.

4.2. Strategi Pengembangan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan.

- 1) Reorientasi renstra litbang dengan memfokuskan pada pemecahan enam agenda pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah (Propeda Propinsi Jawa Tengah).
- 2) Mengembangkan bidang utama penelitian dan pengembangan untuk dapat mengakomodasikan perubahan mendasar kebijakan bidang-bidang pembangunan tahun 2001-2005.
- 3) Mempertajam program-program penelitian dan pengembangan yang lebih implementatif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

4.3. Strategi Pengembangan Organisasi Penelitian dan Pengembangan.

- 1) Peningkatan kedudukan organisasi litbang yang semula sebagai sub unit Bappeda, menjadi badan litbang yang sejajar kedudukannya dengan badan-badan teknis daerah lainnya sesuai dengan peraturan baru pemerintah.
- 2) Meminimalkan struktural organisasi litbang yang akan datang dengan memaksimalkan tugas-tugas pokok fungsional melalui pemfungsian kelompok-kelompok jabatan fungsional peneliti.
- 3) Restrukturisasi pembiayaan kegiatan litbang dengan mengupayakan sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus penelitian serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

4.4. Strategi Peningkatan Sistem Jaringan Penelitian dan Pengembangan.

- 1) Mengembangkan jaringan penelitian dengan pendekatan yang lebih terpadu mencakup berbagai disiplin, sektor dan institusi dalam satu sistem jaringan penelitian dan pengembangan yang terpadu serta sinergic.

- 2) Merevitalisasi fasilitas jaringan penelitian dan pengembangan dengan pemanfaatan teknologi komputerize dan internet secara bertahap dan berkelanjutan.
- 3) Mengoptimalkan jaringan penelitian yang dimiliki sebagai wahana utama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan adopsi teknologi untuk mencapai tujuan kolektif antar lembaga penelitian dan instansi terkait.

BAB V

PENUTUP

Ada beberapa kesimpulan yang penting dan menarik yang dapat ditarik dari kondisi saat ini, isu-su strategis serta hasil analisis faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal yang telah dibahas di dalam bab-bab terdulu dan bersamaan dengan itu juga dalam bab ini akan dikemukakan beberapa rekomendasi atau saran, yang dinilai semestinya perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

A. KESIMPULAN.

1. Arah kebijakan pembangunan penelitian dan pengembangan Propinsi Jawa Tengah dalam Propeda Tahun 2001-2005, adalah mengedepankan penelitian dan pengembangan sebagai ujung tombak perencanaan pembangua daerah. Lebih lanjut peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah dimasa mendatang akan menjadi sangat penting, utamanya pada tingkatan penyusunan kebijakan strategik atau perencanaan. Untuk mendukung hal tersebut kualitas penelitian dan pengembangan harus dapat ditingkatkan, terutama pada aspek manajemen dan sumber daya penelitian yang dimiliki.

2. Bappeda Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya menyadari, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan selama ini mengalami beberapa kendala internal yang berimplikasi pada kualitas hasil penelitian yang relatif tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijaksanaan program-program pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai sub unit Bappeda yang mempunyai otoritas untuk menjalankan fungsi tersebut sarat dengan keterbatasan sumber daya yang diperlukan. Kemampuan merencanakan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan yang integratated dengan prioritas agenda pembangunan daerah, kemampuan sumber daya manusia peneliti dan kemampuan memanfaatkan fasilitas lainnya cenderung menjadi hambatan yang berkelanjutan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unit perencana pembangunan daerah. Untuk kepentingan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah, yakni dalam rangka mendukung fungsi Bappeda secara keseluruhan dirumuskan rencana strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang sifatnya terpadu.
3. Rencana strategi penelitian dan pengembangan diarahkan untuk merespon lingkungan strategis yang meliputi faktor strategi internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor strategi eksternal (peluang dan

ancaman) dilihat dalam prespektif kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan masukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

4. Posisi kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah yang diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT dengan Model Internal-Eksternal Matrik saat ini berada pada posisi strategi pertumbuhan dengan konsentrasi pada integrasi horizontal (nilai total skor IFAS 2,70 dan nilai total skor EFAS 3,30).
5. Alternatif strategi yang tepat pada posisi pertumbuhan dengan integrasi horizontal, adalah melakukan tindakan konsolidasi faktor-faktor internal untuk memanfaatkan peluang faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap rencana strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang menjadi indikator kunci, antara lain dengan melakukan kegiatan penguatan atau pengembangan kelembagaan litbang, pengembangan kemampuan sumber daya manusia litbang, reorientasi kebijaksanaan litbang yang lebih membumi pada masalah agenda pembangunan daerah, pengembangan fasilitas jaringan kerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

6. Keberhasilan strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah ditentukan oleh keserempakan peningkatan indikator-indikator yang signifikan mempengaruhinya untuk bersama-sama atau masing-masing melakukan fungsinya sejalan dengan strategi yang telah digariskan. Keberhasilannya akan semakin meningkat jika kegiatan dari indikator-indikator tersebut bersinergi positif satu sama lainnya. Beberapa indikator yang dominan mempengaruhi atau menjadi indikator kunci tersebut, adalah sebagai berikut :
- a. Kebijakan penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dalam rencana strategi litbang.
 - b. Sumber daya manusia penelitian dan pengembangan.
 - c. Organisasi atau kelembagaan penelitian dan pengembangan.
 - d. Sistim jaringan penelitian dan pengembangan.

B. SARAN.

1. Rencana strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan, merupakan model pendekatan yang lebih banyak memanfaatkan dan mengembangkan faktor-faktor internal serta faktor-faktor eksternal kepenelitian yang dihadapi oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah saat ini. Oleh karena itu kiranya cukup relevan dan sudah saatnya secara rasional menyadari keterbatasan konsepsi serta sumber daya

penelitian yang dimiliki dan selanjutnya memulai membangun keunggulan riset dengan menerapkan secara konsisten rencana strategi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang menjadi salah satu tugas pokok & fungsi Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

2. Menurut jawaban seluruh responden, indikator kualitas penelitian dan pengembangan pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah yang prioritas untuk segera diatasi adalah kualitas SDM Litbang. SDM litbang yang dianggap kurang capable dan acceptable serta kurang mempunyai konsepsi penelitian & pengembangan di masa datang oleh responden, adalah aparatur struktural dan fungsional peneliti pada Bidang Litbang. Kondisi SDM Litbang yang demikian ini jelas sangat signifikan terhadap kualitas litbang yang dihasilkan oleh Bappeda. Oleh karena itu masalah pengalokasian sumber daya manusia penelitian dan pengembangan menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus segera dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pakar di bidang penelitian dan pengembangan.
3. Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan menggunakan Model Internal-Eksternal Matrik, posisi litbang Bappeda saat ini berada pada kelompok growth strategy dengan alternatif strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal. Strategi yang tepat pada posisi ini, adalah melakukan kegiatan penguatan atau pengembangan kelembagaan litbang, pengembangan kemampuan sumber daya manusia litbang,

reorientasi kebijaksanaan litbang dan pengembangan fasilitas jaringan litbang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Strategi-strategi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan dan terintegrasi dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diperoleh kekuatan sinergis untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan daerah.

4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi Tengah dapat membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sesuai dengan kebutuhan daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan yang selama ini melekat pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah, dipandang dari aspek normatif dan otoritas kewenangan serta kebutuhan daerah sudah seharusnya menjadi lembaga teknis daerah dalam bentuk badan staf yang berdiri sejajar dengan badan-badan staf lainnya. Dari aspek manajemen pemerintahan, pemisahan ini akan memberikan peluang pada Balitbang untuk dapat mengembangkan tugas pokok dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan secara profesional serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang hanya bersifat sektoral.

5. Bidang-bidang utama dan program-program litbang yang selama ini dianggap tidak dapat mengakomodasikan program-program prioritas pembangunan daerah, maka sejalan dengan penyusunan Propeda Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 untuk bidang utama dan program litbang harus dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini juga akan memacu terbinanya sumber daya manusia litbang yang merupakan penentu utama keberhasilan kinerja penelitian dan pengembangan.

6. Strategi pengembangan jaringan penelitian pada Bappeda Propinsi Jawa Tengah, seyogyanya melibatkan seluruh unsur lembaga penelitian perguruan tinggi, dinas/intansi, dunia usaha dan lembaga sosial dengan pola integrasi program yang berdampak pada pembangunan daerah. Dengan pola ini diharapkan akan diperoleh suatu sinergi yang dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang benar-benar teruji kesahihan dari berbagai aspek disiplin ilmu, sektor dan insitusi. Sebagai konsekuensi kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, sudah saatnya Bappeda Propinsi Jawa Tengah membangun satu sistim jaringan penelitian yang memanfaatkan teknologi komputerisasi dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengkajian dan Teknologi RI, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/M/KP/V/2000, tentang **Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi 2001-2005.**

Badan Pengkajian Pengetahuan dan Teknologi RI, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/KP/II/2000, tentang **Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional 2000-2004.**

Cortada, James W, 1996, **Total Quality Management : Terapan Dalam Manajemen Sistem Informasi**, Penerbit PT. Andi Offset, Yogyakarta.

Dale Timpe, 1993, **Produktivitas**, PT. Gramedia Asri Media, Jakarta.

Departemen Dalam Negeri RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang **Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.**

Freddy Rangkuti, 2000, **Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Morrisey, George L, 1996, **Perencanaan Jangka Panjang : Menciptakan Perjalanan Strategis Anda**, Penerbit Prenhallindo, Jakarta.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981, tentang **Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**

Sekretariat Negara RI, **Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1999-2004.**

Sekretariat Negara RI, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980, tentang **Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Suharsimi Arikunto, 1998, **Manajemen Penelitian**, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta.

Sumanto, 1995, **Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistik Dalam Penelitian**, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1976, **Metodologi Research Jilid I**, Cetakan ke-IV, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.